

Managemen



BAPPEDA
KABUPATEN POHUWATO

Yowan Tamu, dkk



Sejarah
**PEMBENTUKAN
POHUWATO**

SEJARAH PEMBENTUKAN POHUWATO

Penasehat:

1. Bupati Kabupaten Pohuwato, .H. Syarif Mbuinga, S.Pd, M.Si
2. Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Drs. H. Amien Haras

Pengerah :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pohuwato, Ir. Ismail Pakaya, ME
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Pohuwato, Ir. Irfan Saleh, M.Si

Tim Penulis :

1. Alim Niode
2. Awaludin Ahmad
3. Funco Tanipu
4. Sutrisno Mohamad
5. Yowan Tamu

Asisten Penulis :

1. Basrun Radji
2. Sahrain Bumulo
3. Abdul Halid Lemba

Foto Sampul: Muazman Hamzah

Foto Isi: Dokumen Humas Kab. Pohuwato

Penerbit

Bappeda Kabupaten Pohuwato

Tahun : April 2013

Pengantar Tim Penulis

MERANGKAI SEJARAH, MERAWAT MEMORI KOLEKTIF



MERANGKAI SEJARAH

Gemericik air yang bermain di bibir pantai Marisa kala ufuk menyembul membuat hati kami terkesima dan takjub dengan gurat aura semangat mencipta peradaban yang ditorehkan para pendahulu pada zaman yang lampau. Pantai Marisa adalah saksi hidup tentang kisah heroik juga tragik beberapa puluh tahun yang lalu.

Pohuwato mulanya adalah harapan. Pada awalnya adalah kebutuhan. Inspirasi mengenai Pohuwato sudah dipikirkan dan dirancang sejak beberapa puluh tahun lalu, dan mengalami puncak pada tahun 1999. Saat itu, kehendak daerah untuk memekarkan diri dalam entitas-entitas yang lebih subtil mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat.

Pasca Orde Baru semua berubah. Semangat untuk berkelompok secara homogen diberi ruang secara konstitusional, walaupun Indonesia termasuk Gorontalo memiliki heterogenitas yang cukup beragam. Kondisi inilah

Pengantar Tim Penulis

Merangkai Sejarah, Merawat Memori Kolektif

Merangkai Sejarah

Gemercik air yang bermain di bibir pantai Marisa kala ufuk menyembul membuat hati kami terkesima dan takjub dengan gurat aura semangat mencipta peradaban yang ditorehkan para pendahulu pada zaman yang lampau. Pantai Marisa adalah saksi hidup tentang kisah heroik juga tragik beberapa puluh tahun yang lalu.

Pohuwato mulanya adalah harapan. Pada awalnya adalah kebutuhan. Inspirasi mengenai Pohuwato sudah dipikirkan dan dirancang sejaka beberapa puluh tahun lalu, dan mengalami puncak pada tahun 1999. Saat itu, kehendak daerah untuk memekarkan diri dalam entitas-entitas yang lebih subtil mendapat angin segara dari Pemerintah Pusat.

Pasca Orde Baru semua berubah. Semangat untuk berkelompok secara homogen diberi ruang secara konstitusional, walaupun Indonesia termasuk Gorontalo memiliki heterogenitas yang cukup beragam. Kondisi inilah yang menjadi celah bagi elit lokal untuk memprakarsai adanya daerah baru yang lebih otonom, harapannya lebih makmur dari sebelumnya dengan identitas yang terfasilitasi secara administratif.

Di beberapa kecamatan di ujung barat Gorontalo menjadikan regulasi itu untuk bisa memekarkan diri dari Kabupaten Gorontalo. Boalemo adalah nama pilihan waktu itu. Akhir dari “perjuangan” untuk mewujudkan Boalemo rupanya berakhir dengan ketidakpuasan. Alasan teritorial mengemuka. Tilamuta dianggap tidak merepresentasikan sesuatu yang “tengah”.

Pada saat itulah, beberapa warga pun mulai mempersiapkan lahirnya daerah baru yang lebih otonom ; Pohuwato. Kesejahteraan, perdamaian, dan konsensus adalah titik balik dari apa yang telah diputuskan sebelumnya. Derap langkah pun dipercepat, persiapan administrasi dikebut. Semua untuk satu harapan, satu keyakinan.

Akhirnya, pada medio 2003, Pohuwato pun kemudian lahir dengan damai, tanpa ada ceceran darah seperti di daerah lain diluar Gorontalo. Pohuwato disambut dengan suka cita, keringat dan air mata membasahi bumi Panua.

Merawat Memori Kolektif

Semangat mencipta peradaban dalam sebuah teritori administratif-kontitusional dalam jazirah yang bernama Pohuwato adalah pelatuk sejarah bagi perdamaian lokal. Harapan politik damai yang dilandasi oleh harapan penciptaan masa depan peradaban yang tidak saja mengandung semangat kolektifitas dalam ranah administratif-teritorial, tetapi juga memasuki ruang heroik kemanusiaan. Kelahiran Pohuwato tak saja menjadi instrumen lokal dalam mendamaikan perbedaan dalam mamhami isu teritorial dan kesejahteraan, tetapi juga telah menjadi memori kolektif lokal untuk mengikat kontrak peradaban yang menjamin adanya kesetaraan, penghargaan pada sesama dan pemikiran akan sebuah kesejahteraan lokal.

Pohuwato dalam indeks ekonomi 10 tahun terakhir memang masih sederhana. Tetapi, dalam gurat masa depan, Pohuwato memiliki harapan dan ambisi yang luar biasa.

Maka, penulisan buku mengenai sejarah, prestasi dan masa depan ini tak lain untuk menjadikan Pohuwato sebagai rangkaian dari monumen, peristiwa, harapan, mimpi dan cita-cita. Sejarah, tentu saja sebuah ingatan, semacam warisan yang diturunkan dan disimpan dalam kesadaran kolektif agar kita tahu bahwa banyak orang sebelum era saat ini yang telah bersusah payah mengumpulkan batu dan pasir serta menggali fondasi agar ada rumah (Pohuwato) yang sekarang melindungi kita dari panas dan hujan. Karenanya, mempelajari dan menulis sejarah adalah melakukan perjalanan mudik, suatu *homecoming* dalam jiwa.

Menulis Pohuwato, Menulis Peradaban

Sesaat setelah kami ditawari untuk merangkai potongan-potongan sejarah mengenai pembentukan Pohuwato hingga era kekinian oleh Bappeda Pohuwato,

kami merasakan bahwa ini bukan saja merangkai sejarah, tetapi sekaligus memberi perspektif terhadap dinamika Pohuwato itu sendiri. Ketersediaan data yang terbatas dan juga rangkaian cerita yang masih terburai menjadi tantangan bagi kami untuk bisa menaklukkan itu.

Kami sejak awal menyadari bahwa buku ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pustaka Pohuwato, tetapi kami sadari dan kami yakin bahwa buku ini diperuntukkan untuk mengurai kembali jejak pembentukan Pohuwato yang hampir terbawa angin dan untuk membangkitkan kembali memori kolektif warga Pohuwato menjelang peringatan 1 Dasawarsa (10 Tahun).

Buku ini tak lepas dari bantuan banyak pihak, antara lain ; Bupati Pohuwato yang rela kami ganggu untuk dimintai keterangan, cerita, pengalaman dan kisah. Wakil Bupati Pohuwato yang merelakan waktu untuk menunggui dan membagi pengalaman dari tiap diskusi fokus yang kami gelar. Sekretaris Daerah Pohuwato yang banyak memfasilitasi kami untuk bisa mendapatkan data-data akurat mengenai Pohuwato.

Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Uns Mbuinga, Bapak Syamsu Qamar Badu, Bapak Fahrudin Nento, Bapak Nurudin Abubakar, Ibu Since Kadji, yang terlibat dan juga aktif dalam membagi pengalaman dan sejarah mengenai detik-detik terbentuknya Pohuwato.

Kepada Bapak Abdul Karim Mbuinga, Bapak Ahmad Djuuna, Bapak Al Amin Uduala, Bapak Amran Gaga, Bapak Arfan Tangoy, Bapak Arman Mohammad, Bapak Bahari Gobel, Bapak Daiman Ali, Bapak Daud Tino, Bapak Delbar Hunowu, Bapak Ekiyanis Kono, Bapak Iwan S. Adam, Bapak Muslimin Nento, Bapak Nasir Giasi, Bapak Supratman Nento, Bapak Tasrif Haras, Bapak Umar Malik, Bapak Zakaria Utiahman, Bapak Zen Kono, Bapak Zukri Suratinojo, Bapak Zulkufli Umar atas waktu dan pengalaman disertai berbagai dokumen yang telah membuat buku ini semakin berwarna.

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappeda Pohuwato, Bapak Ismail Pakaya, Sekretaris Bappeda Bapak Irfan Saleh dan seluruh staf Bappeda Pohuwato yang terlibat semenjak awa hingga akhir penulisan buku ini.

Semoga apa yang tertoreh dalam buku ini menjadi sebuah perspektif baru yang bisa memberi warna pada peradaban Pohuwato.

Marisa, April 2013

Tim Penulis

BAB I

PEMEKARAN UNTUK PERDAMAIAN

*Perompak boleh membakar Taman Bunga,
Tapi mereka tidak bisa menunda Musim Semi
(Pepatah Lama)*

Gorontalo Barat di Masa Silam

Ketika Bumi berputar pada porosnya, maka muncullah waktu dan ruang. Ketika keduanya diguyur oleh sinar matahari, maka menyala sumbu sejarah, dan terus menyala, meski tidak ada tempat yang bernama Kabupaten Pohuwato. Sejarah terus berputar ketika kemudian manusia bergulat dengan waktu dan ruang tempatnya hidup. Dan, di jazirah Gorontalo sebelah barat, terjadi sebuah pergulatan unik yang melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai Kabupaten Pohuwato.

Pada tahun 1898, Witkamp seperti juga yang lain, menyebut lingkungan wilayah ini sebagai distrik Paguat, yang berada di bawah *onder afdeling* Gorontalo. Wilayah ini merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan dianugerahi kesuburan tanah. Hasil pertanian sama melimpahnya dengan hasil tambang sehingga banyak pihak melirik wilayah ini.

Salah satu dari pihak yang menikmati kekayaan alam wilayah ini adalah sebuah maskapai Belanda yang bernama *Syndicate* Paguat yang dipimpin *Mr.J.P.Sprenger Van Eijk* (Witkamp,1898). Konon, perusahaan ini

memutar kapital senilai tidak kurang dari f 1.200.000 sebuah jumlah yang sangat besar (Witkamp, 1898). Maskapai lain, *Minjbouw-Maatscha PPIJ* Tilamuta di bawah direksi *Reiss & Co*, dengan Komisaris antara lain *Jhr A.A.A. Plaos Van Amstel* bahkan mengoperasikan kapital senilai f. 150.000. Besarnya modal yang ditanam di wilayah ini menunjukkan potensi besar yang tersimpan dalam wilayah ini. Tidak ada perusahaan yang bersedia menanamkan modal hanya untuk mendapat kerugian. Sesuai kodratnya setiap perusahaan pastilah menginginkan profit dari setiap rupiah yang diinvestasikannya.

Adalah wajar jika masyarakat di sini selalu dan terus merindukan hidup yang lebih sejahtera. Dengan kelimpahan hasil pertanian dan hasil tambang yang ada di buminya, maka wajar jika rakyat menginginkan hal semacam itu. Justru akan tidak wajar ketika masyarakat yang hidup di atas tanah yang subur dan kaya bahan tambang menderita kekurangan dan kemiskinan. Hidup di bumi yang kaya dan dapat memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya adalah keinginan dan hasrat setiap manusia, maka wajar jika kemudian rakyat di wilayah ini menginginkan berdirinya sebuah pemerintahan yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

Kisah Pohuwato: Perjuangan dan Pergulatan Mewujudkan Impian

Kisah tentang Pohuwato, tentu tidak lepas dari kisah tentang Gorontalo, yang sejak lama menjadi “induk” dari wilayah ini. Oleh karena itu, kisah tentang Pohuwato sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari induknya, yaitu Gorontalo.

Boleh jadi pembentukan Provinsi Gorontalo sifatnya “*emergency*”, sekaligus menerima luapan aspirasi masyarakat Gorontalo untuk menunjukkan jati dirinya, yang selama ini tersembunyi atau “disembunyikan” dari dominasi kultur Sulawesi Utara. Ia menjadi “*emergency*” karena takala Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 38 tahun 2000 tertanggal 22 Desember 2000, daerah ini hanya memiliki tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Sementara, “idealnya” pembentukan daerah baru minimal memiliki 5 kabupaten/kota untuk tingkat provinsi dan lima kecamatan untuk tingkat kabupaten/kota. Dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang terluas dan jumlah penduduknya paling banyak. Hampir setengah luas dan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo saat itu.

Kabupaten Gorontalo dengan jumlah wilayah yang luas, rentang kendali pelayanan publik yang jauh, tentu hal tersebut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kurang efisien. Apalagi dengan jumlah penduduk yang relatif besar, dan secara geografis, beberapa kawasan Kabupaten Gorontalo terpencar, semakin menyulitkan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, terutama yang ada di bagian timur yang mencakup Kecamatan Kabila, Suwawa, Tapa, dan Bone Pantai. Harus diakui bahwa, keempat kecamatan tersebut relatif jauh dari Limboto, pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Di masa lalu, seperti halnya wilayah lain di Kepulauan Nusantara, Gorontalo juga merupakan wilayah yang dikontrol langsung oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, Gorontalo dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan:

1. ***Onder Afdeling*** Gorontalo (***Onder Distrik*** yakni ; Atinggola, Kwandang, Sumalata, Batudaa, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa dan Bonepantai)
2. ***Onder Afdeling*** Boalemo (***Onder Distrik*** yakni ; Paguyaman, Tilamuta dan Paguat)

Setelah proklamasi mengantarkan rakyat Indonesia pada kemerdekaan, maka secara otomatis Gorontalo menjadi salah satu wilayah administratif dari negara baru ini. Mulai saat itu, Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu kabupaten.

Waktu terus berjalan, hal-hal besar dan kecil terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tahun 1998, terjadi demonstrasi besar-besar terhadap pemerintahan Orde Baru. Saat itu juga, Presiden Suharto turun dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Reformasi bergulir membawa janji-janji dan harapan baru yang lebih baik bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, perubahan pun bertiup ke wilayah Gorontalo. Maraknya otonomi daerah dan pemekaran, status Gorontalo meningkat menjadi Propinsi. Dan, di bawah status baru ini Gorontalo tumbuh menjadi salah satu propinsi yang kemajuannya disorot oleh banyak kalangan di Indonesia.

Di sinilah kemudian cerita tentang Pohuwato hendak kita telusuri. Seperti yang telah sedikit disinggung di atas, pembentukan kabupaten Pohuwato sebagai daerah otonom seperti yang dikenal dewasa ini memiliki sejarah unik, panjang, dan saling terkait dengan pembentukan kabupaten dan propinsi Gorontalo, terutama dengan kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo.

Sebelumnya, Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah kabupaten Boalemo dan hanya dalam waktu \pm 3,5 tahun menjadi daerah otonom. Keunikannya terletak pada usia yang relatif masih belia, namun melahirkan sebuah daerah baru. Ada ungkapan “mana mungkin seorang bayi melahirkan seorang anak,” namun itulah kenyataan sejarah yang sulit dibantah.

Sejarah kabupaten Boalemo dimulai sejak tahun 1946, ketika terbentuk Negara Indonesia Timur. Saat itu, status Keswaprajaan diperkuat sebagaimana tercatat pada UU No.44 /1946 sehingga daerah Swapraja tidak lagi memasukkan Boalemo dan Daerah Swapraja terdiri dari daerah:

Gorontalo, Buol, dan gabungan Bolaang Mongondow. Dengan keluarnya UU No.29/1959 tentang pembentukan Dati II Se-Sulawesi, Boalemo menjadi salah satu Kewedanaan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Status Kewedanaan Boalemo berlaku sampai dengan keluarnya UU No.5/1974 yang selanjutnya dengan Permendagri No.132/1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota, eks kewedanaan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati Wilayah Kerja Paguat yang meliputi 5 Kecamatan yaitu: Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa, dan Popayato. Kecamatan Paguyaman selanjutnya dimekarkan menjadi Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Boliyohuto. Fakta sejarah inilah yang mendukung pembentukan kabupaten Boalemo, di samping untuk pelayanan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah IV.

Memasuki awal tahun 1990-an, beberapa kali digelar pertemuan yang dilaksanakan di Talamuta membicarakan pembentukan kabupaten baru. Selanjutnya dilaksanakan kembali pertemuan dengan membahas penetapan kota kabupaten. Seluruh tokoh masyarakat berkumpul mewakili 5 (lima) kecamatan yang ada di wilayah pembantu Bupati Wilayah IV yakni, Paguyaman, Tilamuta, Marisa, Paguat, dan Popayato. Hasil pertemuan ini Marisa dan Popayato memilih ibukota kabupaten berkedudukan di Marisa, sementara Paguyaman dan Tilamuta memilih kota kabupaten berkedudukan di Marisa, yang jadi penentu utama adalah Paguat sehingga istilah yang berkembang pada saat itu adalah "Paguat Kecamatan Penentu." Paguat memilih kota kabupaten berkedudukan di Marisa. Hal ini didasarkan lokasi Marisa yang berada di tengah-tengah Popayato (batas paling Barat) dan Paguyaman (batas paling Timur). Sementara pertimbangan pemberian nama kabupaten tidak mengalami kendala karena alasan sejarah.

Gagasan awal pembentukan kabupaten yang otonom di wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah IV yang berkedudukan di Paguat, telah diutarakan jauh sebelumnya sejak 1980-an oleh beberapa anggota dewan Kabupaten Gorontalo antara lain Uns Mbuinga, dkk. Saat itu, para tokoh mulai

memikirkan gagasan tentang pembentukan kabupaten. Selain itu, mereka juga melakukan beberapa upaya untuk menunjang gagasan tersebut, termasuk pengumpulan data-data penduduk yang dibutuhkan untuk menjadi persyaratan. Namun, aspirasi pembentukan kabupaten yang otonom mengalami beberapa hambatan dengan sulitnya pemerintahan pada masa Orde Baru yang bersifat sentralistik.

Ide pembentukan kabupaten ini bergulir kembali pada akhir tahun 1997, terutama datang dari beberapa tokoh antara lain Uns Mbuinga, Nurdin Abubakar, Zakaria Utiahman, Hamdan Sanad, Tasrif Haras, Yusuf Adam, dengan mengagaskan pengumpulan data penduduk dari Paguat sampai Popayato untuk persiapan pembentukan kabupaten. Dalam usaha pengumpulan data ini, salah seorang tokoh dari Lemito, Masenje turut membantu. Upaya pengumpulan data penduduk ini kurang lebih memakan waktu tiga bulan, setelah data terkumpul kemudian disimpan di rumah Uns Mbuinga dan beberapa tokoh ini berjanji siapa saja yang akan menjadi anggota dewan akan memperjuangkan pembentukan kabupaten baru.

Setelah persiapan administrasi selesai dilakukan, maka Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) berkunjung ke Marisa sebagai kota kabupaten termasuk wilayah lain di calon kabupaten Boalemo ini, maka pertimbangan Tim DPOD bahwa setelah melihat hasil survey, baik jumlah penduduk, wilayah dan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia, Wilayah Kerja Pembantu Bupati wilayah IV ini, memenuhi syarat menjadi daerah otonom dengan ibukota kabupaten berkedudukan di Marisa.

Sebelum Rancangan Undang-undang pemekaran disahkan di DPR RI, terjadi tarik menarik tentang penentuan kota, beberapa orang yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Tilamuta dan beberapa yang mengatasnamakan masyarakat Popayato dan Paguat meminta agar kota kabupaten berkedudukan di Tilamuta. Sehingga pada saat itu Bupati Kabupaten Gorontalo Imam Nooriman melaporkan kepada Gubernur

Sulawesi Utara E.E Mangindaan bahwa masih terjadi tarik-menarik tentang kedudukan kota yang pada awalnya berdasarkan kunjungan Tim DPOD bahwa kedudukan kota sudah disepakati berkedudukan di Marisa. Sehingga pada saat itu Gubernur Sulawesi utara E E. Mangindaan memberikan saran agar bagaimana caranya agar kabupaten Boalemo disahkan dulu sebagai kabupaten sebagai daerah otonom, masalah ibukota kabupaten berada di Marisa atau di Talamuta nanti diselesaikan dikemudian hari. Alasan Gubernur ini sangat mendasar, apabila masih terjadi tarik menarik tentang kedudukan kota, maka kemungkinan besar pemekaran kabupaten ini akan ditunda. apabila penundaan pengesahan RUU pemekaran, maka akan menunggu proses pembahasan selanjutnya oleh DPR RI periode selanjutnya dan proses yang hampir selesai ini akan dimulai dari awal kembali. Sementara masyarakat Marisa tidak mengetahui bahwa terjadi permasalahan tentang pengesahan Undang-undang pemekaran, karena sebelumnya masyarakat telah menerima Rancangan Undang-undang dan tidak terdapat pemasalahan tentang kota kabupaten.

Akhirnya Presiden RI dan DPR RI menetapkan UU No. 50 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3899), yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Lahirnya Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa; *Pertama*, berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang pada masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang. *Kedua*, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas

dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo dipandang perlu membentuk Kabupaten Boalemo sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. *Ketiga*, bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Harapan menjadi sebuah daerah yang otonom akhirnya dapat terwujud di wilayah bagian barat Gorontalo, dengan dimekarkanya kabupaten Gorontalo menjadi dua daerah yakni kabupaten Gorontalo menjadi induk dan kabupaten Boalemo sebagai daerah pemekaran, terdiri dari lima kecamatan sebagaimana dalam pasal 3 dalam Undang-undang No. 50 Tahun 1999 yakni : Kecamatan Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa dan Popayato. Sementara dalam pasal 5 batas wilayah kabupaten Boalemo, sebelah utara berbatasan dengan Sumalata, kabupaten Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Boliyohuto kabupaten Gorontalo, sebelah selatan dengan teluk tomini dan sebelah barat dengan Sulawesi tengah.

Dalam Undang-undang ini yang menjadi pasal krusial adalah pasal 7 dan 8. Pasal 7 disebutkan bahwa ibukota kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta, sementara dalam pasal 8 disebutkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak diresmikannya kabupaten Boalemo, kedudukan kota dipindahkan ke Marisa. Kedua pasal ini menjadi polemik, sekaligus menjadi sebuah dilema, bahkan dianggap sebagai "bom waktu" yang bisa memicu perpecahan dalam masyarakat di wilayah yang baru saja dimekarkan ini.

Seiring berjalannya waktu wacana pemindahan kota semakin gencar diwacanakan oleh masyarakat Marisa yang juga mendapat dukungan dari masyarakat Paguat dan Popayato. Wacana ini menimbulkan beberapa

insiden di kalangan masyarakat. Sejak terbentuk sampai terpilihnya Bupati secara Definitif dan terbentuknya DPRD kabupaten Boalemo permasalahan ini selalu menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat bawah sampai kalangan atas. Sehingga muncullah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan munculnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999.

Upaya yang dilakukan adalah membentuk Komite Independen Pelaksanaan Undang-undang No. 50 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2000, komite ini dibentuk bulan April 2002, memiliki susunan personalia Dewan Kohormatan Komite diketuai oleh Uns Mbuinga dan beberapa pengurus lainnya. Dalam upaya memindahkan kota ke Marisa melalui pendekatan yang persuasif.

Untuk menindak lanjuti pemindahan kota kabupaten ke Marisa, maka beberapa perwakilan masyarakat berangkat ke Jakarta yaitu Tasrif Haras, Since Kadji, Arpan Tangoi, Zakaria Utiahman, Haris Nusa, Delbar Hunou, Stenly Ladiku, Nasir Giasi, ikut bergabung dengan tim, Iwan Adam yang merupakan penghubung informasi di Jakarta. Segala persiapan yang diperlukan oleh tim termasuk strategi dan pendanaan dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Rizal Yunus, Adnan Mbuinga, Syarif Mbuinga.

Tim tersebut bertujuan untuk mempertegas permasalahan substansi Pasal 7 dan 8 UU No. 50 tahun 1999. Tim tersebut bertemu dengan Biro Hukum DEPDAGRI, dan mendapat penjelasan bahwa pasal yang dipermasalahkan sudah sangat jelas, artinya bahwa kota seharusnya dipindahkan ke Marisa. Setelah bertemu dengan Biro Hukum, Tim disarankan untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan dengan Komisi II di ruang legislasi DPR RI, Komisi II berjanji akan membahas hal ini dengan departemen terkait, dan juga akan mengkomunikasikan dengan anggota Dewan Kabupaten Boalemo dan beberapa perwakilan dari Tilamuta yang waktu itu juga berada di Jakarta. Tim ini juga berniat

menghadap Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Hari Sabarno, namun pada waktu itu sedang tidak berada di dalam negeri. Dalam kunjungan tim di Jakarta banyak dibantu oleh tokoh-tokoh Gorontalo antara lain, Tursandi Alwi (Kepala Balitbang Depdagri dan juga mantan Penjabat Gubernur Gorontalo), Roem Kono (Tokoh Masyarakat Gorontalo), Zein Bazeber (F-PPP), bahkan seorang tokoh Gorontalo anggota DPR RI dari PDIP Max Lamuda dari Daerah Pemilihan Kalimantan.

Pertemuan dengan anggota DPRD kabupaten Boalemo dan beberapa perwakilan masyarakat Tilamuta disepakati bahwa penyelesaian polemik yang berkembang dewasa ini diselesaikan dengan cara arif dan bijaksana. Kesepakatan ini menjadi sangat mendasar karena dikhawatirkan masyarakat di wilayah ini menjadi terpecah bahkan kemungkinan akan terjadi konflik secara terbuka sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah lain terhadap permasalahan sama dengan yang dihadapi oleh masyarakat di Boalemo.

Kepulangan Tim dari Jakarta membuat permasalahan semakin memuncak, terhembus isu-isu yang provokatif dalam masyarakat bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Marisa datang ke Jakarta untuk mempercepat pemindahan kota ke Marisa. Sehingga masyarakat Tilamuta melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kedudukan kota tetap berada di Tilamuta dengan berbagai alasan sesuai dengan pasal 7 bahwa kedudukan kota kabupaten berada di Tilamuta.

Bupati Boalemo pada waktu itu, Iwan Bokings (alm), dan Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Nizam Dai menjadi sangat dilematis dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ketika pembangunan dilaksanakan di Tilamuta maka masyarakat Marisa bergejolak menolak pembangunan yang dilakukan, akan tetapi pembangunan tidak dilaksanakan, sementara Tilamuta masih merupakan kota kabupaten. Permasalahan ini semakin gencar dibicarakan dikalangan masyarakat. Sehingga pejabat pemerintahan lama kelamaan akan terkuras tenaganya hanya membahas masalah kontroversi Undang-undang.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat Marisa dan Tilamuta, maka Bupati Boalemo Iwan Bokings datang ke Jakarta dan bertemu dengan Tim DPOD agar kiranya Tim DPOD secara langsung dapat memantau permasalahan yang ada dalam masyarakat Tilamuta dan Marisa. Pada tahun 2001 tim DPOD dan Komisi II DPR RI datang di Tilamuta dalam mencari solusi permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat.

Namun di sisi lain, upaya memekarkan beberapa kecamatan di kabupaten Boalemo dilakukan. Sejak tahun 2001 beberapa kecamatan di Kabupaten ini dimekarkan sehingga jumlah kecamatan yang semula hanya 5, telah menjadi 10 kecamatan, yakni bertambah menjadi 5 kecamatan baru hasil pemekaran, yaitu:

1. Dulupi (pemekaran Tilamuta),
2. Lemito (pemekaran Popayato),
3. Manunggu (pemekaran Paguat),
4. Randangan (pemekaran Marisa), dan
5. Wonosari (pemekaran Paguyaman).

Titik Balik Perjuangan

Harapan baru dengan adanya kabupaten yang otonom pada kenyataannya menimbulkan berbagai penafsiran serta prasangka dalam masyarakat terutama masyarakat Paguat, Marisa, Lemito, dan Popayato yang memandang bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo tidak sesuai dengan aspirasi sebelumnya yakni bahwa melalui hasil *voting* perwakilan masyarakat Kecamatan Paguat, Marisa dan Popayato menginginkan kota kabupaten adalah Marisa, sedangkan Paguyaman dan Tilamuta menginginkan kota kabupaten adalah Tilamuta. Dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo terdapat

dalam pasal 7 yakni kota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta dan Pasal 8 menyebutkan Selambat lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak diresmikan Kabupaten Boalemo, kedudukan kota dipindahkan ke Marisa.

Seiring bergulirnya waktu, isu pemindahan kota semakin gencar bertiup di tengah-tengah masyarakat Marisa dan kecamatan lain di wilayah ini. Berbagai kesempatan dimanfaatkan untuk terus berupaya agar pasal 8 Undang-undang No. 50 ini segera diwujudkan oleh pemerintah. Melalui wakil-wakil rakyat terutama dari daerah pemilihan Paguat, Marisa, Lemito, dan Popayato mengambil kesempatan dalam sidang Paripurna ke IV tahun 2001 yang saat itu dipimpin oleh Nizam Dai. Hal ini diperkuat oleh padangan dari Fraksi Bintang Perjuangan dengan tegas menyampaikan pandangannya bahwa Dewan segera mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan perintah undang-undang yakni memindahkan ibukota kabupaten ke Marisa.

Mulai saat itu ditempuh beberapa cara untuk mencoba melakukan revisi Undang-undang, maka berangkatlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boalemo ke Jakarta dalam melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri serta ke komisi II DPR RI. Beberapa perwakilan masyarakat dari Marisa juga datang untuk melakukan *pressure* ke DEPDAGRI dan Komisi II DPR RI, agar kiranya penerapan pasal 7 dan pasal 8 ini dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran perwakilan anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan perwakilan masyarakat Marisa ke Jakarta mendapat respon yang positif dari pemerintah pusat. Hal ini dikaitkan dengan kunjungan Tim DPOD dan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Boalemo.

Hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 digelar pertemuan di rumah dinas Bupati Boalemo yang dihadiri perwakilan masyarakat Tilamuta maupun masyarakat Marisa, hadir pula Tim DPR RI, Gubernur Gorontalo, Bupati

Boalemo, dan beberapa anggota DPRD Propinsi Gorontalo, anggota DPRD Boalemo.

Pertemuan yang penuh kekeluargaan namun juga diwarnai sedikit ketegangan ini menghiasi suasana dalam mencari solusi permasalahan yang ada. Pertemuan ini diawali dengan pengantar oleh ketua Tim DPR RI yang mengharapkan rentang kendali pemerintahan yang menjadi permasalahan utama dalam pelayanan masyarakat sehingga pemekaran daerah merupakan salah satu solusi dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, beberapa perwakilan masyarakat, baik Tilamuta maupun masyarakat Marisa, mengungkapkan bahwa kedatangan Tim DPR RI ini merupakan kunjungan yang dapat memberikan solusi terbaik dari semua permasalahan serta beberapa wacana yang muncul akhir-akhir ini, namun perlu dicatat bahwa pertemuan ini menunjukkan kepada semua pihak baik pemerintah daerah maupun Tim DPR RI bahwa kekhawatiran yang mengarah pada konflik horisontal dengan sendirinya dapat dimentahkan. Namun, jika permasalahan yang ada tidak segera diselesaikan, maka kemungkinan tersebut bisa muncul dan dapat dan yang begitu besar seperti yang terjadi di daerah lain.

Melalui beberapa rapat kecil baik dari pihak masyarakat Tilamuta maupun masyarakat Marisa terdapat beberapa polemik yang muncul antara lain pemindahan ibukota, Tilamuta menjadi sebuah kota, atau Marisa menjadi sebuah kota. Opsi lainnya yaitu pemekaran kabupaten di mana Marisa menjadi Kabupaten dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 1999 dan kabupaten Boalemo menjadi kabupaten baru. Dalam artian polemik ini yang menjadi kabupaten induk adalah Boalemo dengan ibukota Tilamuta atau sebaliknya kabupaten Pohuwato dengan ibukota Marisa. Kemungkinan lainnya kabupaten Boalemo mekar menjadi kabupaten Boalemo dengan ibukota Tilamuta, dan kabupaten baru dengan ibukota Marisa. Opsi-opsi tersebut juga memunculkan polemik baru antara lain tentang aset-aset serta perangkat daerah yang sudah ada di Kabupaten Boalemo setelah pindah ke

Marisa, maka seluruh aset serta perangkat pemeritahan akan dialihkan menjadi aset pemerintah Boalemo di Marisa.

Beberapa polemik ini dibahas dalam pertemuan namun dengan semangat penuh kekeluargaan, keterikatan suku merupakan suatu perekat dalam mengurai perbedaan yang ada, maka muncullah gagasan-gagasan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama yang berisi bahwa:

1. Kabupaten Boalemo disepakati dimekarkan menjadi: Kabupaten Boalemo dengan ibukota Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato dengan ibukota Kecamatan Marisa.
2. Kabupaten Boalemo meliputi Kec. Mananggu, Kec. Tilamuta, Kec. Dulupi, Kec. Wonosari Kec. Paguyaman, dan Kabupaten Pohuwato meliputi Kec. Popayato, Kec. Lemito, Kec. Randangan, Kec. Marisa, Kec. Paguat.
3. Sebelum keluar Undang-undang baru, maka Undang-undang No. 50 Tahun 1999 masih diberlakukan dengan ibukota Kabupaten Boalemo masih berada di Tilamuta.
4. Kabupaten Boalemo sesuai Undang-undang No. 50 Tahun 1999 disepakati berubah nama menjadi Kabupaten Pohuwato dengan ibukota Marisa.

Pemilihan nama kabupaten baru dalam pertemuan tersebut berdasarkan usulan dari beberapa perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Beberapa nama calon kabupaten yang muncul antara lain Omayuwa, Gorontalo Barat, Patilanggiyo, dan Pohuwato. Pemilihan Pohuwato sebagai nama calon kabupaten baru berdasarkan berbagai pertimbangan historis. Alasan historis bahwa kecamatan Paguat yang pada masa lalu yang terbentang dari Paguat sampai Popayato saat ini merupakan kecamatan yang dialek Gorontalnya adalah *Pohuwato*, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, *Pohuwato* (Paguat) menjadi *onder distrik*

Paguat karena orang-orang Belanda sangat sulit mengucapkan kata *Pohuwato*, digantilah nama *Pohuwato* ini menjadi paguat.

Pohuwato yang dalam bahasa Gorontalo mengandung beberapa pengertian; *Le Huato* (tertabrak, menabrak), *Huwa-huat* (melakukan perjalanan panjang) sehingga kata *Pohuwato* merupakan Perjalanan *Muhibah* atau merupakan perjalanan yang mulia atau juga dalam perjalanan dalam niat baik, alasan ini sangat memadai untuk dijadikan nama calon kabupaten.

Dengan suara yang bulat, dipililah nama *Pohuwato* menjadi nama kabupaten baru dan hal ini menjadi pertimbangan Tim DPOD untuk dibahas di Jakarta. Hasil kesepakatan ini pula yang dituangkan kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Marisa diwakili oleh Uns Mbuinga, Nasir Giasi, Abd. Karim Mbuinga, Hamka Nento, Since Kadji, sementara dari pihak Tilamuta diwakili oleh Lahmudin Hambali, Herman Bater, Rustam Saidi, Sunaryo Abas dan Fendy Mopangga.

Berawal dari kesepakatan bersama antara semua pihak ini, semangat merajut impian masa depan mulai menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Gagasan untuk tetap bersama dan bersatu mulai ditindak lanjuti dengan berbagai kesepakatan.

Peran Komite Independent sangat besar dalam menjembatani semua perbedaan yang ada di kalangan masyarakat, baik Tilamuta cs maupun Marisa cs. Dalam beberapa hal, kehadiran komite tersebut merupakan titik balik dari perjuangan pelaksanaan Undang-undang no. 50 thn 1999.

Selanjutnya kunjungan tersebut pula ditindaklanjuti dengan sebuah kesepakatan bersama antara masyarakat Tilamuta dan masyarakat Marisa yang dikenal dengan Komunike bersama masyarakat yang diprakarsai oleh Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo (P2DKP) dan Komite Percepatan Marisa Ibukota Pohuwato (KPPMIP). Komunike Bersama yang pada hari sabtu 28 September 2002 juga merupakan tindak lanjut dari

kesepakatan bersama yang dilakukan pada hari Jum'at 24 Mei 2002 yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati Boalemo berisi 6 butir yang merupakan seruan moral dan jeritan hati dan mengurai sebuah perbedaan yang sangat mengawatirkan bagi masyarakat bahkan dianggap sebagai air sejuk yang memadamkan api dalam sekam.

Komunike Bersama ini pada intinya melahirkan suatu kesepakatan untuk terutama menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah Propinsi Gorontalo. Secara rinci, komunike bersama ini merumuskan:

1. Meminta para elit se-propinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Boalemo dan seluruh masyarakat agar menyatukan visi dan misi dalam merealisasikan pemekaran daerah kabupaten Bolalemo.
2. Kepada para elit politik (legislatif/eksekutif) dan masyarakat Boalemo diharapkan secara bersama-sama memperjuangkan konsep yang mendukung dan memudahkan serta mempercepat proses pemekaran.
3. Seluruh elit politik (legislatif/eksekutif) dan masyarakat Boalemo diminta untuk tidak memberikan statemen maupun pernyataan-pernyataan yang justru memperkeruh suasana yang selama ini makin kondusif yang pada akhirnya menghambat percepatan pemekaran.
4. Pemekaran kabupaten Boalemo menjadi dua daerah, yakni kabupaten Pohuwato dan kabupaten Boalemo adalah mutlak diperlukan dan harus menjadi kenyataan demi propinsi Gorontalo.
5. Menerima hasil kajian dan keputusan DPOD serta DPR RI apapun hasil dan bentuk pemekaran dengan mengacu pada kesepakatan 24 Mei 2002.
6. Meminta kepada para elite se-propinsi Gorontalo dan masyarakat Boalemo agar memperjuangkan percepatan pemekaran selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2002.

Semangat membangun suatu daerah dan kepedulian terhadap masa depan Gorontalo membakar semangat masyarakat melalui Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo (P2DKB) dan Komite Pelaksana Percepatan Marisa kota Pohuwato (KPPMIP) melahirkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik, terutama Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Pasal 7 dan 8. Berbagai ide dan argumen serta persepsi, baik yang positif maupun negatif beradu mengiringi sebuah perjalanan cita-cita dan harapan.

Langkah Administratif: Marisa, Kiblat Baru Pohuwato

Sejak hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 dengan modal kesepakatan bersama antara wakil masyarakat Tilamuta dan Marisa yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD, baik Kabupaten Boalemo maupun Pemerintah Propinsi Gorontalo berupaya menyelesaikan kebutuhan secara administratif untuk mewujudkan keinginan masyarakat.

Pada besok harinya tepatnya hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2002 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo mengeluarkan surat keputusan Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rekomendasi/Pernyataan Sikap Mendukung Pemekaran Kabupaten Boalemo. Surat Keputusan ini dikeluarkan disertai beberapa pertimbangan:

1. Bahwa untuk meyahuti aspirasi masyarakat Boalemo yang berkembang dewasa ini untuk pemekaran wilayah Kabupaten Boalemo, perlu beroleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa dukungan Dewan terhadap aspirasi tersebut dilandasi oeh keinginan untuk memecu perkembangan melalui pemekaran wilayah

sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Dalam Surat Keputusan DPRD ini memperhatikan tiga hal yakni; *Pertama*, Berita Acara Kesepakatan Perwakilan masyarakat Marisa dan Tilamuta hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 Pukul 21.55 Wita. *Kedua*, Hasil rapat gabungan Tim Sosialisasi DPRD Kabupaten Boalemo ke Kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Boalemo. *Ketiga*, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Boalemo ada rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2002.

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo menetapkan:

1. Mendukung sepenuhnya aspirasi dan kesepakatan masyarakat Boalemo tentang pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi Kabupaten Boalemo dengan kota Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato dengan kota Marisa.
2. Kabupaten Boalemo meliputi Kec. Manangu, Kec. Tilamuta, Kec. Dulupi, Kec. Wonosari, dan Kec. Paguyaman dan kabupaten Pohuwato meliputi Kec. Popayato, Kec. Lemito, Kec. Randangan, Kec. Marisa, Kec. Paguat.
3. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Gorontalo atas segala kebijaksanaan, bantuan dan dukungan positif dalam rangka mempercepat realisasi pemekaran kabupaten Boalemo.

Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Ba Nizam Dai, B.Sc, Wakil Ketua DR. Jeanne Manalip dan empat Fraksi masing-masing Fraksi Partai Golkar . Mardijah Ch. Yusuf, Fraksi Persatuan Demokrasi Ba Sahrudin Bakue, Fraksi Bintang Perjuangan Ba Rocky Budiman, SH, Fraksi TNI/POLRI Ba Sukidi.

Hari Minggu tanggal 26 Mei 2002, Bupati Boalemo Ba Ir. Iwan Bokings, MM melalui surat Nomor 135/01/83/V/2002 perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo yang bersifat penting dan ditujukan kepada Gubernur Gorontalo untuk mendapatkan persetujuan yang juga melampirkan surat kesepakatan tanggal 24 Mei 2002 serta Surat Keputusan Dewan Nomor 8 Tahun 2002. Bahwa untuk menyelesaikan selusi terhadap permasalahan yang ada, maka diseati pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua):

1. Kabupaten Pohuwato dengan Ibokota Marisa, yang mewilayahi: Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Paguat.
2. Kabupaten Boalemo dengan kota Kecamatan Tilamuta, yang mewilayahi Kecamatan Mananggu, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan paguyaman, merupakan Kabupaten baru.

Selanjutnya setelah aspirasi di atas disetujui oleh DPRD Kabupaten Boalemo, maka Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo tidak keberatan dan mendukung 2 (dua) pemekaran tersebut. Dalam surat ini yang menarik adalah Kabupaten Pohuwato adalah merupakan kabupaten Boalemo sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diganti namanya menjadi kabupaten Pohuato. Sementara Kabupaten Boalemo merupakan kabupaten baru.

Hari Senin Tanggal 27 Mei 2002 merupakan kerja keras DPRD Propinsi Gorontalo dan Pemerintah Propinsi secara maraton segera menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di kabupaten Boalemo. Diawali dengan Pernyataan Sikap tentang Dukungan Fraksi-fraksi DPRD Propinsi Gorontalo terhadap Pemekaran Kabupaten Boalemo yang ditandatangani oleh 4 (empat) Fraksi yakni masing-masing Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ketua Murni Jati Tanib, SH, Sekretaris Ir. Hendra R. Abdul, Fraksi Partai Golongan Karya dengan ketua Ba Drs. Habu Wahidji sekretaris

Ir. Budianto Napu, Fraksi Perserikatan Demokrasi Ketua Ir. La Ode Haimudin sekretaris Irianto Nur Huda, Fraksi TNI/POLRI ketua Willem Wuisan, BA sekretaris Sukiman.DPRD Propinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan Nomor 19 tahun 2002 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pemekaran Kabupaten dan memohon kepada Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan kepada DPR RI tentang Pemekaran Kabupaten Boalemo untuk ditetapkan dengan Undang-undang. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada, 1) Presiden, 2) DPR R.I, 3) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 4) Gubernur Gorontalo, 5) Walikota dan Bupati se-Propinsi Gorontalo.

Hari Senin Tanggal 27 Mei 2002, Gubernur Gorontalo mengajukan surat dengan Nomor 135/01/1346/2002 persetujuan/pengusulan pembentukan kabupaten baru (pemekaran kabupaten Boalemo) kepada Ba Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan persetujuannya dan mengusulkan Pemekaran Kabupaten baru sebagai berikut ; a) Kabupaten Pohuwato (kabupaten Induk), b) Kabupaten Boalemo (Kabupaten Pemekaran) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Surat persetujuan Gubernur ini merupakan penyelesaian secara administrasi di jajaran pemerintah dan DPRD, baik usulan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo, persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo, dan persetujuan pemekaran DPRD Propinsi Gorontalo.

Selanjutnya, untuk segera mengambil langkah-langkah guna mempercepat tercapainya pemekaran, maka pada tanggal 9 Juli 2002 pemerintah kecamatan Marisa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa Sebagai kota Kabupaten Pohuwato (KPPMIKP) melalui surat keputusan Camat Marisa Drs. Achmad J. Djuuna dan ditetapkan tanggal di Marisa tanggal 9 Juli 2002. Komite ini di bawah koordinator Camat Marisa (Drs. Achmad J. Djuuna), Kapolsek Marisa (Iptu.Pol. Imran Abubakar), Dan-Ramil Marisa (Lettu Inf. Fachrodji). Komite ini terdiri dari 4 (empat) komisi yakni Komisi I Bidang Pengalokasian Bangunan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah diketuai oleh Ba

Zukri Surotinojo, AP, Wakil Ketua Yusuf Adam, Sekretaris Djumadi Prajitno, Wakil Sekretaris Ibrahim Amana dengan 26 anggota. Komisi II Bidang Kebersihan dan Penataan Ketua Hamka Nento, Wakil Ketua Farouq Sanad, Sekretaris Mohamad Zainal Cono, Wakil Sekretaris Isa Ali dengan 14 anggota. Komisi III Bidang Inventarisasi Bangunan Bakal Perkantoran dan atau Rumah Tinggal Pejabat Pemda Boalemo Mulai dari Ba Bupati Boalemo dst. yang diketuai oleh Zakaria Utiahman, Wakil Ketua . Since Adam Kadji, Sekretaris Darwin Tolingguhu, Wakil Sekretaris Mohamad Nair dan 9 anggota. Komisi IV Bidang Sekretariat/Dokumen Ketua Abdul Karim Mbuinga, Wakil Ketua Wazir Antuli, Sekretaris Drs. Haris Adam Nusa, Wakil Sekretaris Ris P. Suleman dan 4 orang anggota. Komite ini mempunyai tugas menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo secara Kolegial dalam percepatan realisasi Pembangunan Kota Marisa sebagai Kota Kabupaten Puhuwato dan bertanggung jawab kepada Camat Marisa serta uraian tugas dan lain-lain sesuai dengan ruang lingkup tiap-tiap Komisi dan akan berkembang sesuai dengan keadaan.

Dalam melakukan tindakan berpola untuk percepatan pemekaran paling tidak ada peran-peran yang merupakan tindakan berpola dan merupakan sebuah strategi masyarakat. Peran ini di bagi dalam 3 (tiga) lokus ; *Pertama*, gerakan percepatan pemekaran ini dilakukan oleh tokoh masyarakat yang merupakan tokoh sentral dalam segala tindakan yang dilakukan dan hal ini diperankan oleh Uns Mbuinga, *Kedua*, pola tindakan yang dilaksanakan dalam mengkoordinasikan dan menjembatani hal-hal yang dilakukan di tingkat kabupaten dengan propinsi serta peran dalam mensosialisasikan melalui media massa baik lokal maupun nasional, peran ini dilakukan oleh Syarif Mbuinga yang pada saat itu bersama dengan kelompok mahasiswa bergerak di wilayah propinsi. *Ketiga*, pola tindakan yang dilakukan dalam menjembatani seluruh informasi baik yang bersifat tertutup maupun terbuka seluruh informasi in disampaikan kepada tokoh sentral dan langka-langkah yang akan diambil guna menyelesaikan maupun

melakukan tindakan akan dikomunikasikan dengan lulus yang pertama. peran ini dilakukan oleh Iwan Adam yang saat itu berada di Jakarta. Seluruh peran yang ada selalu bersinergi dalam menyelesaikan berbagai pola tindakan yang akan dilaksanakan.

Seluruh upaya telah dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah harapan yang menjadi impian sejak awal untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan otonom.akhirnya seluruh perjuangan membuahkan hasil yang maksimal serta merupakan solusi yang bijak guna menghindari konflik yang dikhawatirkan semua pihak. Pada tanggal 25 Februari masyarakat Marisa menyaksikan sidang Paripurna DPR RI tentang pengesahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo.

Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Undang-undang ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain ; a) bahwa untuk memacu kemajuan Propinsi Gorontalo pada umumnya, kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ; b) bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu ; c) bahwa dengan pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

BAB II

MENGENAL KABUPATEN POHUWATO

Boleh jadi pembentukan Provinsi Gorontalo bersifat “darurat”, sekaligus menerima luapan aspirasi masyarakat Gorontalo untuk menunjukkan jati dirinya, yang selama ini tersembunyi atau “disembunyikan” dari dominasi kultur Sulawesi Utara. Ia menjadi “darurat” karena takala Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tertanggal 22 Desember 2000, daerah ini hanya memiliki tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo.

Sementara, “idealnya” pembentukan daerah baru minimal memiliki 5 kabupaten/kota untuk tingkat provinsi dan lima kecamatan untuk tingkat kabupaten/kota. Dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang terluas dan berpenduduk paling banyak. Hampir setengah luas dan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo saat itu.

Salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang proses pembentukannya terbilang unik adalah Kabupaten Pohuwato. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Boalemo yang saat itu baru saja berusia 3,5 tahun. Ini merupakan kenyataan yang unik mengingat bahwa kabupaten induknya saja masih berusia sangat belia, ibarat “*bayi melahirkan anak*”. Kabupaten Puhowato dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Wilayah Administratif

Kabupaten Pohuwato dibentuk berdasarkan undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo yang disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Januari 2003. Kabupaten Pohuwato secara resmi berdiri pada tanggal 6 Mei 2003 yang ditandai dengan pelantikan Drs. Yahja K. Nasib sebagai Penjabat Bupati Pohuwato.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut antara lain disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Boalemo yang mempunyai luas wilayah ± 6.761,67 km² perlu dibentuk Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Paguat. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa ibu kota Kabupaten Pohuwato berkedudukan di Marisa (Pasal 8 ayat 2).

Secara geografis, Kabupaten Pohuwato terletak antara 0,27° - 0,01° Lintang Utara dan 121,23° - 122,44° Bujur Timur. Pada tahun 2003 kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan dengan adanya 9 pemekaran kecamatan baru. Ujung paling selatan di Tanjung Panjang pada 0,41° Lintang Selatan dan 121,804° BT. Paling Utara di Gunung Tentolomatina pada 0,938° LU dan 121,776° BT. Batas Paling Barat di Gunung Sentayu pada

0,682° LU dan 121,173°BT. Dan paling Timur di desa Tabulo pada 0,506° LU dan 122,152°BT.

Wilayah Kabupaten Pohnuato merentang meliputi daerah seluas 4.244,31 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 134.121 jiwa. Secara administratif, wilayah kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Buol di sebelah utara; di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong; Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo.

Hingga September 2011, Kabupaten Pohnuato terdiri atas 13 kecamatan, 3 kelurahan, dan 100 desa. Pembagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pohnuato adalah sebagai berikut:

1. Buntulia
2. Dengilo
3. Duhiadaa
4. Lemito
5. Marisa
6. Paguat
7. Patilanggio
8. Popayato
9. Popayato Barat
10. Popayato Timur
11. Randangan
12. Taluditi
13. Wanggarasi.

Adapun data lengkap nama kecamatan dan desa/ kelurahan di Kabupaten Pohnuato hingga September 2011 adalah sebagai berikut:

1. Buntulia, terdiri atas 7 desa, yaitu: (1) Buntulia Tengah; (2) Buntulia Utara; (3) Hulawa; (4) Karya Indah; (5) Sipatana; (6) Taluduyunu; dan (7) Taluduyunu Utara.
2. Dengilo, terdiri atas 5 desa, yaitu: (1) Huta Moputi; (2) Karangetang; (3) Karya Baru; (4) Padengo; dan (5) Popaya.
3. Duhiadaa, terdiri atas 9 desa, yaitu: (1) Bulili; (2) Buntulia Barat; (3) Buntulia Jaya; (4) Buntulia Selatan; (5) Duhiadaa; (6) Mekar Jaya; (7) Mootilango; (8) Padengo; dan (9) UPT Duhiadaa.
4. Lemito, terdiri atas 8 desa, yaitu: (1) Balobalonge; (2) Kenari; (3) Lemito; (4) Lemito Utara; (5) Lomuli; (6) Suka Damai; (7) Wonggarasi Barat; dan (8) Wonggarasi Tengah.
5. Marisa, terdiri atas 8 desa, yaitu: (1) Botubilotahu Indah; (2) Bulangita; (3) Marisa Selatan; (4) Marisa Utara; (5) Palopo; (6) Pohuwato; (7) Pohuwato Timur; dan (8) Teratai.
6. Paguat, terdiri atas 11 desa, yaitu: (1) Buhu Jaya; (2) Bumbulan; (3) Bunuyo; (4) Kemiri; (5) Libuo; (6) Maleo; (7) Molamahu; (8) Pentadu; (9) Siduan; (10) Sipayo; dan (11) Soginti.
7. Patilanggio, terdiri atas 6 desa, yaitu: (1) Balayo; (2) Dudepo; (3) Dulomo; (4) Ilo Heluma; (5) Manawa; dan (6) Suka Makmur.
8. Popayato, terdiri atas 10 desa, yaitu: (1) Bukit Tingki; (2) Bumi Bahari; (3) Dambalo; (4) Popayato; (5) Telaga; (6) Telaga Biru; (7) Torosiaje; (8) Torosiaje Jaya; (9) Trikora; dan (10) Tunas Harapan.
9. Popayato Barat, terdiri atas 7 desa, yaitu: (1) Butungale; (2) Dudewulo; (3) Molosipat; (4) Molosipat Utara; (5) Padengo; (6) Persatuan; dan (7) Tunas Jaya.
10. Popayato Timur, terdiri atas 7 desa, yaitu: (1) Bunto; (2) Kelapa Lima; (3) Londoun; (4) Maleo; (5) Marisa; (6) Milangodaa; dan (7) Tahele.
11. Randangan, terdiri atas 13 desa, yaitu: (1) Ayula; (2) Banuroja; (3) Huyula; (4) Imbody; (5) Manunggal Karya; (6) Motolohu; (7)

Motolohu Selatan; (8) Omayuwa; (9) Patuhu; (10) Pelambane; (11) Sari Murni; (12) Sidorukun; dan (13) Siduwonge.

12. Taluditi, terdiri atas 7 desa, yaitu: (1) Kalimas; (2) Malango; (3) Mekarti Jaya; (4) Panca Karsa I; (5) Panca Karsa II; (6) Tirto Asri; dan (7) UUT Marisa VI.

13. Wonggarasi, terdiri atas 7 desa, yaitu: (1) Bohusami; (2) Bukit Harapan; (3) Lembah Permai; (4) Limbula; (5) Tuweya; (6) Wonggarasi Timur; dan (7) Yipilo.

Lambang Kabupaten



Arti Lambang Kabupaten Pohuwato:

1. Lambang Daerah Kabupaten Pohuwato pada bagian luar berbentuk segi lima melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.
2. Lambang Daerah Kabupaten Pohuwato pada bagian dalam berbentuk lingkaran bola dunia atau bumi menggambarkan kebulatan tekad masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam berjuang dan membangun Kabupaten Pohuwato. Dengan bentuk dalam yang menampakkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna dasar merah

jambu memiliki makna kehangatan, kelembutan, kewibawaan dan semangat juang. Harapannya Pohnuwo akan selalu mendapat pemimpin yang berhati lembut, dekat dengan masyarakat, berwibawa, dan memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Pohnuwo.

3. Lambang Daerah Kabupaten Pohnuwo memuat kondisi dan potensi alam Kabupaten Pohnuwo antara lain: Gunung, Laut, Kelapa, Sawah, dan Hutan.
4. Lambang Daerah Kabupaten Pohnuwo dapat dibuat dalam berbagai ukuran sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan di mana lambang tersebut ditempatkan.
5. Lambang Daerah Kabupaten Pohnuwo memiliki nuansa global:
 - A. Warna merah jambu adalah warna yang memberi makna kehangatan, kelembutan, kewibawaan, dan semangat juang.
 - B. Model Pohon Kelapa yang melengkung memberi makna gerak dinamis yang tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa depan.
 - C. Gunung, Hutan, Sawah, Laut melambangkan potensi kekayaan Sumber Daya Alam Kabupaten Pohnuwo sebagai Sumber penghidupan masyarakat.
 - D. Perahu Layar berwarna hitam dengan layar berkembang warna putih menggambarkan keteguhan dan semangat juang masyarakat Kabupaten Pohnuwo dalam mengarungi samudra kehidupan dan menandakan sebagai Kota Pantai.
 - E. Lingkaran Bola Dunia atau Bumi merupakan makna tempat berpijak dan berjuang seluruh umat manusia dan menggambarkan kebulatan tekad masyarakat Kabupaten Pohnuwo dalam berjuang dan membangun.
 - F. Bintang adalah lambang ketuhanan yang maha esa mengandung makna kepercayaan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Pohnuwo untuk selalu mendapat

petunjuk dan ridha dari Allah SWT. Bentuk bintang berwarna kuning emas juga mengandung makna cita-cita yang tinggi dalam meraih kejayaan.

G. Padi, Kapas, dan Rantai merupakan lambang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lahir bathin dan merupakan cita-cita hidup seluruh umat manusia di mana rantai memiliki makna bahwa adanya pengakuan persatuan dan kesatuan (ikatan yang kuat) baik secara lokal, nasional, ataupun global dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Rangkaian gambar padi, kapas dan rantai membentuk lingkaran dan bergerak menuju ke satu titik yaitu gambar bintang mengandung makna bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup, manusia harus berusaha dengan giat dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT.

H. Pita berwarna merah dengan tulisan Kabupaten Pohuwato berwarna putih mempunyai makna semangat juang dan keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan yang dilandasi dengan hati yang tulus dan suci.

6. Lambang Daerah Kabupaten Pohuwato memiliki nuansa nasional: Padi dan Kapas yang mengandung makna kemakmuran dan kesejahteraan seperti pada Pancasila. Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

7. Lambang Daerah Kabupaten Pohuwato memiliki nuansa lokal:

A. Bintang adalah lambang keagamaan sehingga selaras dengan filosofi Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah.

B. Perahu layar di tengah adalah lambang keteguhan dan semangat juang masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam mengarungi samudra kehidupan hal ini sangat sesuai dengan

semangat tidak mengenal menyerah yang ditunjukkan masyarakat dalam membangun Kabupaten Pohuwato seutuhnya dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- C. Merah Putih pada tulisan Kabupaten Pohuwato menunjukkan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang dilandasi niat yang suci dan hati yang tulus.
- D. Gunung, hutan, sawah, laut dan pohon kelapa yang khas melambangkan potensi Kabupaten Pohuwato.

8. Pemaknaan warna dan simbol lainnya dalam lambang:

- A. Dari bentuk dan warna yang terdapat dalam Lambang Kabupaten Pohuwato tersebut bila dipadukan memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah masyarakat yang religius, dinamis, teguh pendirian, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai cita-cita yang suci yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan tetap menjaga perdamaian, keamanan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- B. Simbol yang memberi makna pada terbentuknya dan disahkannya Kabupaten Pohuwato:
 - Dua buah pohon kelapa yang setiap pohonnya mempunyai tiga butir kelapa bila dijumlahkan menjadi 6 butir melambangkan terbentuknya Kabupaten Pohuwato dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari tahun 2003.
 - Rantai yang berjumlah 25 Butir melambangkan tanggal 25
 - Kelapa yang berjumlah dua pohon melambangkan Bulan Februari

- Dua buah Pohon kelapa yang setiap pohonnya mempunyai buah tiga butir melambangkan tahun 2003
- Kapas yang berjumlah 17, Nama Kabupaten Pohuwato berjumlah 8 huruf dan Padi berjumlah 45 melambangkan tanggal, bulan, dan tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Warna dalam logo bermakna:

1. Merah jambu bermakna kehangatan, kelembutan, dan kewibawaan.
2. Biru bermakna kedamaian dan ketenangan.
3. Hijau bermakna kemakmuran dan kesejahteraan.
4. Kuning bermakna keagungan dan kemuliaan.
5. Putih bermakna kesucian dan keluhuran.
6. Merah bermakna keberanian dan perjuangan.
7. Hitam bermakna keteguhan.
8. Coklat bermakna kedewasaan.

Penduduk

Pada tahun 2009 penduduk Pohuwato berjumlah 128.049 jiwa dengan persebaran 30 jiwa per km². Kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Duhiadaa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 277 jiwa per km² sedangkan yang terendah adalah Popayo Timur dengan kepadatan 10 jiwa per km².

Potensi Alam

Kabupaten Pohuwato memiliki sumber kekayaan yang cukup lengkap mulai dari tambang emas, biota laut, hutan, perikanan, dan perkebunan.

Sayangnya sektor-sektor tersebut kurang terjamah karena kurangnya pengelola yang berkualitas. Sektor pertambangan emas merupakan sektor yang menjanjikan karena di kabupaten ini tersimpan cadangan emas sebesar 15.000.000 ton yang berada di kecamatan Marisa. Beberapa kawasan lain yang memiliki potensi pertambangan adalah Paguat, Taluditi, Patilanggio, dan Randangan. Secara umum potensi bahan galian mineral di Kabupaten Pohuwato dapat dibagi menjadi dua, yaitu potensi bahan galian bernilai strategis dan potensi bahan galian bernilai industri. Pada sektor agrobisnis, Kabupaten Pohuwato merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Produksi jagung Kabupaten Pohuwato mencapai 47 persen dari total produksi jagung di provinsi Gorontalo. Selain jagung, sektor unggulan lainnya ialah kelapa dan kakao, sementara untuk peternakan adalah ternak sapi.

Dengan seluruh potensi dan kekayaan yang dimilikinya ini, rasanya tidak mustahil untuk membangun Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten yang maju, berkeadilan, beradab, dan sejahtera. Tentu saja, hal ini harus dilakukan dengan pengelolaan yang memiliki visi jelas dan mengedepankan kepentingan rakyat. Tanpa itu, kekayaan dan potensi yang dimiliki justru akan menjadi bencana yang merusak.

BAB III

MENGHADANG BADAI

Humaya Hipohebila
Moi Bunga Bite Tapila
Humaya Dedeo Ayu
Mo'i Bunga Wayu
(Wasiat Leluhur Gorontalo)

Di Tsaqifah Bani Saidah orang ramai berkumpul. Turut hadir di tempat itu para elite utama. Mereka sedang merundingkan pemimpin yang paling pantas menggantikan kedudukan Nabi Muhammad. Pada saat yang sama jasad agung baginda Rasulullah Muhammad Saw sedang terbaring kaku. Maka hujan protes pun tercurah: mana yang lebih utama, menyelenggarakan pemakaman jenazah Rasulullah atau memilih pemimpin pengganti beliau?

Di tengah pro kontra, ada satu hal yang terngiang terus dalam ingatan masyarakat. Suatu saat Nabi berpesan: "Kalau kalian bepergian lebih dari seorang, hendaklah kalian mengangkat seorang pemimpin." Akhirnya, setelah menempuh segala macam perdebatan yang alot dan memakan waktu karena masing-masing kelompok (Muhajirin dan Anshar) mengajukan calonnya masing-masing, Abubakar dipilih secara aklamasi sebagai khalifah, pengganti Nabi. Sejak saat itu Abubakar pun dikenal sebagai salah seorang dari empat khalifah yang lurus (*khalifah rasyidin*), sosok pemimpin yang sangat dijunjung umat Islam dan menjadi teladan dari model kepemimpinan dalam komunitas Islam.

Sesungguhnya, memilih pemimpin bukan hanya menjadi persoalan bagi umat Islam saja. Umat mana pun, atau bangsa mana pun di dunia ini

pastilah terjadi perdebatan mengenai siapakah yang berhak menjadi pemimpin bagi mereka? Berbagai usulan, ide, dan gagasan diajukan sebagai solusi atas persoalan ini. Dan, saat ini bila kita tengok lembaran-lembaran sejarah umat manusia, kita akan mengetahui betapa pemilihan sosok pemimpin terkadang membawa persoalan rumit bagi sebuah komunitas. Pemilihan pemimpin terkadang menyulut terjadinya konflik yang tidak jarang melahirkan perang saudara di antara anggota suatu komunitas.

Namun bagaimanapun manusia memiliki kecenderungan untuk mencari sosok pemimpin. Butuh akan sosok pemimpin. Sosok pemimpin inilah yang akan menuntun ke arah mana komunitas melangkah, bagaimana mewujudkan tujuan bersama, dan menjaga semangat bersama untuk meraih cita-cita bersama. Mengarahkan, membimbing, mengayomi, melindungi, dan memberi teladan merupakan tugas berat yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Itu sebabnya, pemimpin bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal bagaimana melayani dan menjamin kepentingan bersama dapat dijalankan. Inilah kaidah yang diyakini oleh seluruh masyarakat beradab.

Inilah diantara beberapa hal yang harus dihadapi Kabupaten Pohuwato. Di tengah berbagai kesibukan dan keriuhan untuk menjadi sebuah kabupaten baru, dan di tengah berbagai kekurangan, kabupaten yang baru lahir ini harus segera menentukan dan memilih salah satu putra terbaiknya untuk disertai kemudi biduk dan membawa seluruh rakyat menuju kesejahteraan dan kedamaian, seperti yang diharapkan semua manusia – dan menjadi tujuan dari pembentukan kabupaten baru ini.

Mei 2003, biduk bernama Pohuwato itu angkat jangkar. Layar dikembangkan, haluan membelah riak-riak gelombang, saat kapal itu menjauh dari dermaga dan menuju ke samudra lepas otonomi daerah. Adalah benar bahwa sukses berlayar sejauh ribuan, bahkan jutaan, mil ditentukan oleh satu mil pertama. Dan inilah saat yang menegangkan ketika kapal bernama Pohuwato bersiap menempuh mil pertamanya.

Secara teknis, semua telah siap. Ibarat kapal, Pohuwato telah memiliki segala-galanya untuk dipakai berlayar. Alat-alat navigasi telah lengkap, sumber daya berlimpah, kapal sangat kokoh, hanya untuk mengendalikan kapal sebegus itu juga diperlukan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman sekaligus memiliki ketulusan, kebulatan tekad, dan semangat kerja tinggi, mengingat bahwa perjalanan ini tidak hanya menempuh lapis-lapis jarak, namun jauh mengarungi lorong-lorong waktu yang sangat panjang dan penuh misteri. Kesalahan pemilihan awak kapal akan mengakibatkan kapal rusak dan bukan tidak mungkin malah tenggelam.

Tentu tidak mudah untuk mengurus sebuah kabupaten dengan wilayah seluas sekitar 4.244,31 kilometer persegi ini, ditambah dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 134.121 jiwa. Diperlukan kepiawaian tersendiri dalam memimpin wilayah seluas dan penduduk sebanyak itu, apalagi di tengah gelombang dunia yang saat ini semakin sulit ditebak arahnya.

Mengawal Kabupaten Pohuwato

Proses pembentukan Kabupaten Pohuwato berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan dalam serentang perjuangan yang gigih dan tak mengenal lelah, walau terkadang mengalami hambatan. Melalui komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, inisiatif pembentukan Kabupaten Pohuwato telah disampaikan pada rapat pleno DPR. Kabupaten Pohuwato diusulkan oleh 30 anggota Komisi II, termasuk beberapa kabupaten lainnya. Setelah didapat persetujuan dari Komisi II, maka dilakukan rapat Banmus, dan dibentuk panitia khusus yang bertugas membahas usulan tersebut, bersama-sama dengan eksekutif, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Rapat paripurna DPR menyetujui pembentukan empat daerah tingkat II yakni Kotamobagu (Sulawesi Utara), Kabupaten Pakpak Barat (Sumatra

Utara), serta Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango (Provinsi Gorontalo). Sembilan fraksi menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah tingkat II atas inisiatif DPR, dan selanjutnya dibahas dalam Badan Musyawarah DPR dengan agenda pembentukan pansus RUU tersebut.

Pertemuan antara Depdagri dan DPR terus dilakukan guna memenuhi komitmen dalam merealisasikan pemekaran daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pembahasan pemekaran daerah seperti yang diketahui bahwa dari 25 daerah, 8 daerah masuk dalam inisiatif pemerintah termasuk Pohuwato dan Bone Bolango.

Tidak bisa dinafikan bahwa Kabupaten Boalemo sangat berperan aktif dalam mengawal pembentukan Kabupaten Pohuwato. Ini terbukti dengan dibentuknya Tim Asistensi Persiapan Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Boalemo Iwan Bokings Nomor 15 Tahun 2003. Tim ini diketuai oleh Yahya K. Nasib dan Hikman Katohidar selaku Koordinator I yang membidangi urusan pemerintahan.

Ketika Pohuwato terbentuk, semua struktur yang ada di Tim Asistensi itulah yang juga dilibatkan dalam pemerintahan PLH Bupati Yahya K. Nasib. Selain membangun infrastruktur di Tilamuta, Bupati Boalemo Iwan Bokings juga membangun infrastruktur di Marisa. Contohnya kantor Bappeda sekarang, itu nomenklatur di APBD Kabupaten Boalemo, yang diberi nama Gedung Pertemuan Umum. Kemudian Bupati membangun gedung yang disebut Guest House, rumah dinas Bupati, walau demikian, dalam ketentuan perundangan tindakan semacam itu sebenarnya tidak dibolehkan. Dengan kata lain, memunculkan nomenklatur yang sama itu dilarang, misalnya kalau sudah membangun kantor DPRD maka tidak boleh lagi membangun kantor yang sama.

Ini merupakan upaya yang dilakukan Bupati Boalemo Iwan Bokings dalam mengawal Kabupaten Pohuwato. Dan akhirnya waktu yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Pohuwato datang juga. Pada 6 Mei 2003, peresmian kabupaten yang dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango berlangsung begitu meriah. Kemeriahan ini juga dibarengi dengan sebuah tanggung jawab yang sudah menanti. Semangat perjuangan tidak hanya sebatas sebelum dan setelah pemekaran daerah terwujud, namun juga harus terus dihidupkan disaat perjalanan mewujudkan cita-cita menyejahterakan masyarakat Pohuwato baru dimulai dan masih merupakan perjalanan yang panjang. Hal ini bercampur aduk di kalangan pejuang dan pelaku pemekaran dan seluruh masyarakat Pohuwato. Bagi masyarakat, pertanyaan yang sudah pasti merebak ialah apakah setelah pemekaran daerah ini nasib mereka lebih sejahtera? Sedangkan pertanyaan yang berembus di lingkaran pelaku dan pejuang pemekaran ialah apakah tugas dan tanggung jawab mereka hanya sebatas memekarkan daerah? Bukankah tugas yang lebih berat berada di depan mata: mengawal kabupaten ini agar bisa mewujudkan cita-cita mulianya?

Dalam mengawal kabupaten baru ini diperlukan langkah-langkah strategis agar perjuangan berada dalam jalur yang diharapkan. Demikian, misalnya dalam hal pengangkatan pejabat bupati yang akan mempersiapkan Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten otonom dan mandiri. Dengan terbentuknya DPRD kabupaten dan sebelum terpilihnya bupati definitif, ada beberapa nama muncul yang bakal menjadi pejabat bupati yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo dan beroleh persetujuan pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dari beberapa nama yang ada, salah satu yang dianggap paling tepat oleh Bupati ialah Yahya K. Nasib, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo. Walaupun terjadi silang pendapat mengenai siapa saja yang pantas untuk menjadi pejabat Bupati Pohuwato, khususnya figur yang diusulkan oleh Bupati Boalemo dan Gubernur

Gorontalo, akhirnya melalui beberapa pertimbangan para tokoh dan masyarakat Pohuwato menerima Yahya K. Nasib sebagai penjabat bupati yang akan memimpin Pohuwato dalam mempersiapkan perangkat daerah, termasuk pemilihan kepala daerah dan pembentukan DPRD kabupaten.

Pengangkatan Yahya K. Nasib sebagai Penjabat Bupati Pohuwato ini dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Peresmian Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2003 sekaligus dirangkai dengan pelantikan Drs. H. Yahya K. Nasib selaku Penjabat Bupati Pohuwato sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55.-219 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2005. Pelantikan PLH Yahya K. Nasib oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah mewakili Menteri Dalam Negeri dilakukan di Bone Bolango karena pertimbangan tempat dan jarak sangat dekat. Setelah proses pelantikan dilanjutkan dengan prosesi secara adat Gorontalo yaitu adat *moloopu* dan *modepito*.

Setelah dilantik, Yahya K. Nasib selaku penjabat bupati segera melaksanakan tugas untuk mempersiapkan pemerintahan. Saat itu dia melakukan pelantikan pejabat eselon 2 dan 3. Dan yang dilantik sebagai pejabat tidak lain adalah orang-orang yang tergabung dalam Tim Asistensi. Meski demikian, ada juga beberapa orang yang diambil dari luar daerah, yang mengisi tempat-tempat strategis.

Untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) saat itu harus diusulkan oleh Bupati Boalemo sebagai kabupaten induk. Ada tiga nama untuk posisi ini yang diusulkan Bupati kepada Gubernur Gorontalo, dan dua di antaranya ialah Niko Hadi dan Sunandar Bokings. Rupanya ketiga nama tersebut tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan, sehingga Gubernur Gorontalo menunjuk Ranis Luwiti sebagai Sekda, kendati sempat ditolak oleh Bupati

Boalemo. Dalam hal ini pengangkatan Ranis Luiti selaku Sekda dianggap Bupati melangkahi wewenangnya. Dia beranggapan bahwa kabupaten induk berhak mengusulkan pejabat-pejabat daerah yang akan menduduki jabatan pemerintahan daerah pemekaran sehingga dia meminta kepada Gubernur agar nama-nama yang sebelumnya diusulkan oleh Bupati bisa dipertimbangkan, atau kalau tidak mengusulkan Sekda yang baru selain Ranis Luwiti.

Isu penolakan Ranis Luwiti sebagai Sekda sempat menjadi perdebatan sehingga Bupati Iwan Bokings meminta agar Ranis Luwiti memaparkan dulu visi dan misinya untuk Pohuwato. Mendengar imbauan ini, Ranis Luwiti pun langsung menghadap kepada Bupati sekaligus sebagai laporan kepada kabupaten induk. Akhirnya silang sengketa mengenai Sekda ini dapat diselesaikan dengan dilantikannya Ranis Luwiti selaku Sekda Pohuwato.

Proses pemerintahan Yahya K Nasib terus berjalan. Selama menjabat, dia mempersiapkan infrastruktur guna menunjang pelaksanaan pemerintahan di wilayah tersebut. Yang pertama dibangun ialah Kantor Bupati, BPKAD, Dinas Pertanian. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut diambil dari APBD mini kabupaten Boalemo.

Pada tahun 2004 Pohuwato berhasil membentuk DPRD sehingga bisa mengelolah APBD dari pusat. Dengan diplomasi dan kerja sama antara Pemerintahan Yahya K. Nasib beserta koleganya yang didukung masyarakat, pemerintahan Yahya K. Nasib melakukan terobosan dan spekulasi dalam rangka membangun Pohuwato. Langkah ini ternyata menghasilkan nilai positif. Mereka berhasil menerapkan gagasan mereka dalam membangun Kabupaten Pohuwato. Visi mereka mereka dalam membangun Pohuwato ialah "Terwujudnya Kabupaten Pohuwato yang Definitif, Produktif, Tangguh, dan Damai yang Dilandasi oleh Iman dan Takwa". Adapun penjelasan visinya ialah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang definitif ialah pemerintahan eksekutif dan legislatif yang terbentuk berdasarkan hasil pilihan rakyat.
2. Produktif artinya masyarakat Pohuwato mampu mengelola sumber daya alam yang ada untuk peningkatan derajat kehidupannya.
3. Tangguh artinya masyarakat mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kemampuan diri mereka untuk mencapai kesejahteraan.
4. Damai artinya walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama namun tetap dapat melangsungkan kehidupan yang damai berlandaskan iman dan takwa.

Sementara untuk mewujudkan visi Kabupaten Pohuwato, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun perekonomian berbasis agrobisnis, agroindustri, pertambangan, dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju ekonomi tangguh.
2. Membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan pendidikan, kesehatan, nilai-nilai budaya, dan agama guna menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan atau menumbuhkembangkan partisipasi dan produktivitas serta meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera.
4. Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan serta pembentukan lembaga pemerintahan daerah yang definitif.

Adapun tujuan dan program kegiatan yang menjadi program andalan pada pemerintahan Yahya K. Nasib ialah:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, agama, dan nilai-nilai budaya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
4. Berjalannya sistem pemerintahan daerah dan terbentuknya pemerintahan daerah yang definitif.

Pada masa pemerintahannya yang sudah berjalan baik, Yahya K. Nasib mempunyai niat baik juga. Dia ingin menjadi bupati definitif dengan cara merangkul masyarakat, atau bahkan kalau perlu naik melalui partai politik namun tidak tahu partai mana yang akan dijadikannya kendaraan. Hanya saja dia tidak sanggup mengontrol diri, tidak menyadari bahwa dia hanyalah pejabat bupati dan itu sebabnya dia bermaksud menjadi bupati definitif. Meski niat tersebut wajar dan bisa diterima, namun Yahya K. Nasib tidak menyadari ada bahwa perilakunya yang mengecewakan masyarakat Pohuwato, sehingga masyarakat Pohuwato tidak lagi menyukai kepemimpinannya. Tumpukan kekecewaan akhirnya berujung pada demonstrasi masyarakat yang menuntut Yahya K. Nasib diganti.

Gejolak yang muncul mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi besar-besaran, meminta Fadel Muhammad selaku Gubernur Gorontalo mencopot Yahya K. Nasib. Bahkan saat itu Fadel Muhammad seolah-olah disandera, tak bisa keluar rumah dinas bupati jika tidak memberi kepastian bahwa Yahya K. Nasib dilengserkan dari jabatannya. Masyarakat memanfaatkan momen, karena saat itu ada kunjungan pak Fadel ke Pohuwato,

sehingga berkordinasilah para koordinator lapangan untuk unjuk rasa melengserkan Pak Yahya. Akhirnya, diputuskan malam itu bahwa pak Yahya diganti, tepatnya pada bulan Janauri 2005. Masyarakat Pohuwato mendesak pemerintahan provinsi untuk mengganti Bupati Yahya K Nasib dengan Pejabat yang baru. Berkat desakan masyarakat, pemerintah provinsi mengganti Yahya K. Nasib dengan penjabat baru, H. Abubakar Mopangga, SH.

Abubakar Mopangga menjadi penjabat Bupati Pohuwato kedua sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55-64 Tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005, yang kemudian diperpanjang sampai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.55-776A Tahun 2005 tanggal 18 Agustus 2005.

Pada dasarnya pada masa pemerintahan Bupati Pohuwato Yahya K Nasib dan Abubakar Mopangga tidaklah terjadi perubahan yang signifikan, karena Penjabat Bupati Abubakar Mopangga hanya melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Yahya K. Nasib. Ditambah lagi pada saat itu pemerintahan Abubakar Mopangga fokus pada persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Bupati Hasil Demokrasi Langsung

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pertama kali diadakan di Kabupaten Pohuwato, Zainuddin Hasan terpilih sebagai Bupati Pohuwato. Dialah bupati pertama yang dipilih masyarakat Pohuwato berdasarkan aspirasi mereka, dan bukan karena tawar-menawar politik di tingkat elite.

Dalam Pilkada pertama Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada tahun 2005 tersebut – menurut KPUD Pohuwato 2005 -- terdapat sekitar 106.901 penduduk yang memiliki hak pilih (sumber: KPUD Pohuwato 2005). Sedangkan pertarungan memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati diikuti oleh lima pasang:

1. Nomor urut 1 Drs. H. Ali D. Khaly dan Syarifudin Adam, SH, M.BA mendapat suara 10,21 persen.
2. Nomor urut 2 Drs H. Mohammad Tasriq Usman, M.Pd dan Hikman Katohidar, SH, M.Si mendapat suara 7,93 persen.
3. Nomor urut 3, H. Zainuddin Hasan, MBA dan Ir. Yusuf Giasi mendapat 28,35 persen.
4. Nomor urut 4, Dra. Reyna Usman Ahmadi, MM dan Drs. Syamsu Qamar Badu, M.Pd mendapat suara 27,10 persen.
5. Nomor urut 5, Drs. Ardin Pakili dan Ir. Mikson Yapanto mednapat suara 25,41 persen.

Drs. H. Ali D. Khaly dan Syafrudin Adam, SH. MBA merupakan calon yang diusung PKB. Drs. H. Mohammad Tasriq Usman, M.Pd dan Hikman Katohidar, SH, M.Si., berasal dari PBR dan PBB. H. Zainuddin Hasan dan Ir. Yusuf Giasi, MM diusung PDIP dan PPP. Dra. Reyna Usman Ahmadi, MM dan Drs. Samsu Qamar Badu, M.Pd diusung Partai Golkar. Terakhir Drs. Ardin Pakili dan Ir. Mikson Yapanto diusung oleh beberapa partai kecil.

Berdasarkan jumlah perolehan suara, H. Zainuddin Hasan dan Ir. Yusuf Giasi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato periode 2005–2010. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55-826 Tahun 2005, mereka dilantik pada 22 September 2005 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Zainuddin Hasan dan Yusuf Giasi, terbangun sebuah tatanan kemasyarakatan yang harmonis. Tak ada konflik agama yang mencuat di kalangan masyarakat karena masyarakat Pohuwato dikenal dengan kehidupan kemasyarakatan yang kental dengan suasana religius. Di mana-mana kita melihat budaya masyarakat senantiasa berelasi dengan unsur keagamaan, yaitu agama Islam. Tak heran, semua latar kehidupan sosial bernuansa islami, entah itu dapat dilihat dalam berbagai ritual maupun

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato untuk melakukan hal-hal baru yang bertentangan dengan agama Islam. Walau disadari masyarakat Pohuwato bukanlah masyarakat yang seluruhnya Islam, melainkan ada juga masyarakat Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, namun dalam hal kepatuhan, keyakinan itu masih sangat terjaga.

Begitu pula dengan perkembangan infrastruktur yang terjadi di Pohuwato, yang berbanding lurus dengan perubahan kebudayaan. Kebudayaan yang selama ini menjadi karakter manusia pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangannya terlihat dari gaya hidup masyarakat yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini bisa dimaklumi karena masyarakat Pohuwato adalah masyarakat yang cukup terbuka dengan konsep berpikir global.

Meneropong beberapa pergeseren yang terjadi di dalam masyarakat Pohuwato pada masa pemerintahan ini dapatlah dikerucutkan menjadi beberapa hal pokok, di antaranya adalah perubahan sudut pandang berpikir dan juga perubahan perilaku. Dua hal ini agaknya merepresentasikan wajah baru masyarakat Pohuwato kini. Masyarakat yang dahulunya cenderung terisolasi dari keterbukaan karena berada jauh dari pusat kota Gorontalo menjadi masyarakat yang pemikirannya bisa dikatakan jauh lebih inklusif.

Di era arus informasi yang kian mengglobal dengan tanpa adanya sekat-sekat dimensi di berbagai belahan dunia, sedikit banyak berimplikasi terhadap konsep berpikir masyarakat Pohuwato dewasa ini. Pernyataan ini bisa lebih sedikit disederhanakan: bahwa masyarakat Pohuwato kini lebih berpikir terbuka dibandingkan dengan masyarakat dahulu yang mengedepankan kultur yang mengacu pada agama dan moral, sehingga dahulu pola berpikir terbuka hanya dianggap sebagai doktrin asing yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan yang makin tinggi dan bervariasi juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam menapak tilas perkembangan pola pikir yang makin maju. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik menjadikan warga Pohuwato banyak yang meninggalkan daerah mereka dan menuntut ilmu di luar daerah. Karena bagaimanapun, harus diakui, sistem pendidikan di luar daerah jauh lebih maju.

Pendidikan yang lebih maju dan berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Pohuwato, sebab aset sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi yang besar di masa mendatang. Dengan alasan itu pula pemerintah Pohuwato terus memacu generasi mudanya agar giat mencari pendidikan yang lebih baik. Ini terbukti pada masa pemerintahan Zainuddin Hassan, pihak pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada sejumlah mahasiswa putra daerah guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan kebijakan ini diharapkan para mahasiswa sebagai generasi penerus nantinya bakal memberikan kontribusi akademik kepada pemerintahan selanjutnya.

Meluasnya daerah Pohuwato sangat berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat saat ini. Banyak daerah yang menjadi tujuan kaum pedagang. Alhasil, daerah yang tadinya tidak begitu menggeliat mulai memperlihatkan aktivitas-aktivitas ekonomi, yang selain menjadi tujuan para pedagang juga menjadi sumber barang dagang. Selain dengan berdagang dan menjadi guru serta pegawai pemerintah, sumber pendapatan rakyat pun amat beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, usaha kerajinan tangan, dan industri. Industri saat itu ada yang dimiliki oleh perorangan ataupun lembaga atau daerah untuk kepentingan daerah. industri-industri berkisar pada industri pertanian, pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan umum pemerintah semisal pembangunan jalan, irigasi, dan lain-lain. Pembangunan irigasi juga sangat berpengaruh dalam pertanian dan perkebunan-perkebunan yang luas. Lahan perkebunan yang dimiliki oleh perorangan

ataupun negara atau daerah tersebut banyak memberi hasil yang menggiurkan.

Motivasi apa pun yang merebak dalam perjalanan pemerintahan Zainuddin Hasan, semuanya merupakan perluasan yang telah direncanakan dengan baik oleh pemerintahan Zainuddin Hassan, meski sebagian kecil berlangsung secara kebetulan. Pada masa pemerintahan ini berlangsung pemekaran wilayah. Alasan pemekaran beberapa wilayah didasarkan pada kesuburan tanahnya, kedudukan strategisnya dalam dunia perdagangan, serta strategis untuk menjadi basis ekonomi kerakyatan. Kecamatan Taluditi misalnya, yang merupakan lumbung besar bagi pertanian khususnya jagung. Selain itu Taluditi berada di tengah-tengah antara Marisa dan Randangan.

Keadaan sosial masyarakat Pohuwato pada masa pemerintahan Zainuddin Hassan juga mulai berubah. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah terpencil, di mana mereka mengenal adanya kelas sosial meski di dalam agama mana pun tidak membenarkan hal itu. Kondisi sosial masyarakat Pohuwato pada Zainudin Hassan mengalami perubahan hampir di segala lini kehidupan, seperti pembangunan infrastruktur yang meliputi pengembangan material, dan juga aspek-aspek kebudayaan yang selama ini menjadi ciri eksistensi manusia. Pada masa pemerintahan ini pembangunan infrastruktur bergeliat dengan maraknya pembangunan sarana dan prasarana penunjang kehidupan seperti perkantoran, hunian, jalan, dan jembatan. Pembangunan yang berkala ini dilakukan demi menjawab tuntutan zaman yang setiap saat berubah.

Perubahan tersebut meski tidak terlalu drastis namun telah cukup mewakili dalam mengurai masalah gejolak perubahan sosial. Daerah yang semula hanyalah pedesaan telah berubah menjadi kota yang berpenduduk padat serta memiliki mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Hal ini merupakan wujud implementasi dari visi dan misi Zainuddin Hassan dan Yusuf Giasi, yang telah menetapkan lima program unggulan sebagai bingkai

kebijakan pemerintah daerah lima tahun mendatang. Program unggulan tersebut terdiri dari:

1. Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Peningkatan sumber daya manusia.
3. Kehidupan keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat.
4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.
5. Pengembangan kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Kelima program inilah yang coba dijalankan oleh Zainuddin Hasan dan Yusuf Giasi, walau pada kenyataannya belum 100 persen terealisasi.

Selama masa pemerintahan Zainudin Hasan, tercatat pemekaran wilayah yang cukup signifikan, sebagai bukti dari kesungguhan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus melakukan pemerataan kesejahteraan dan ketersediaan infrastruktur. Jika pada masa Yahya K. Nasib Pohuwato hanya memiliki tujuh kecamatan, maka pada masa Zainudin Hasaan kecamatan-kecamatan yang ada dimekarkan menjadi tiga belas kecamatan:

1. Kecamatan Randangan
2. Kecamatan Marisa
3. Kecamatan Popayato
4. Kecamatan Patilanggio
5. Kecamatan Dengilo
6. Kecamatan Taluduti
7. Kecamatan Paguat
8. Kecamatan Lemito
9. Kecamatan Buntulia
10. Kecamatan Wanggarasi
11. Kecamatan Duhiadaa
12. Kecamatan Popayato Barat
13. Kecamatan Popayato Timur

Dalam perjalanan sebagai bupati Pohuwato, Zainuddin Hasan telah menetapkan beberapa kebijakan politik. Selain melakukan pemekaran, beberapa kebijakan pentingnya ialah menjadikan Pohuwato sebagai pusat perdagangan. Begitu pula dalam bidang intelektual. Pada saat masa pemerintahannya memasuki periode kedua, Zainuddin Hasan mengambil kebijakan yang paling didukung oleh masyarakat Pohuwato: memberikan beasiswa kepada putra daerah Pohuwato yang berekonomi lemah. Pada mulanya Zainuddin Hassan merasa ragu untuk menjalankan gagasan ini, sebab dia sendiri tak pernah melakukan hal itu pada tahun sebelumnya. Namun setelah berembuk dengan para staf yang ada di Pohuwato, dia pun memerintahkan untuk segera mengumpulkan data putra daerah yang harus dibantu, yang layak menerima beasiswa .

Selain beberapa kontribusi yang telah disebutkan di atas, semisal perluasan daerah dan lain-lain, pemerintahan Zainuddin Hasan juga telah memberikan kontribusi lain untuk kepentingan pemerintahan di Pohuwato selanjutnya. Salah satu keberhasilan Zainuddin Hasan dalam kepemimpinannya ialah membangun infrastruktur sarana dan prasarana, serta melakukan pengembangan APBD dan PAD, kinerja ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, prasarana perhubungan, dan irigasi.

BAB IV

Transisi dan Harapan

Sebagai kabupaten muda, Pohuwato niscaya belum banyak mengalami kemajuan seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Ini merupakan hal yang wajar mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan dan disediakan oleh Kabupaten Pohuwato. Tantangan pembentukan infrastruktur pemerintahan saja, misalnya, bukanlah perkara sederhana. Struktur pemerintahan daerah belum terbangun, sementara infrastruktur lain seperti gedung perkantoran masih harus dibangun. Tentu saja dibutuhkan kesungguhan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang kokoh dan mantap. Namun apa yang dilakukan para tokoh, pemimpin, dan masyarakat Pohuwato dalam bekerja keras memajukan daerah mereka sehingga cepat menjadi daerah yang maju sejahtera, dan aman, layak mendapat acungan jempol. Sejak resmi dibentuk, seluruh masyarakat Pohuwato seolah berpacu untuk bahu-membahu membangun daerah mereka sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang mendasari pembentukan kabupaten Pohuwato itu sendiri.

Sebagai catatan atas kerja keras yang telah dilakukan oleh semua pihak, berikut ini kami sajikan jejak pembangunan sedari masa awal terbentuknya kabupaten Pohuwato hingga masa-masa sekarang ini. Catatan ini sudah pasti dibuat bukan dengan semangat untuk membandingkan keberhasilan para pemimpin (dalam hal ini bupati), namun lebih untuk menunjukkan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Pohuwato. Karena bagaimanapun, tanpa dukungan kerja rakyat, seorang

pemimpin yang paling mahir sekalipun tak akan mampu berbuat apa pun juga.

Masa Kepemimpinan Yahya K. Nasib dan Abubakar Mopangga

Yahya K. Nasib merupakan orang pertama yang mendapat keberuntungan untuk memimpin Kabupaten Pohuwato. Dilantik sebagai penjabat bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55.-219 Tahun 2003 bertanggal 2 Mei 2003, Yahya K. Nasib segera melakukan berbagai langkah untuk membangun kabupaten yang baru berdiri ini. Tercatat, Yahya K. Nasib melakukan penataan sistem birokrasi, pembangunan infrastruktur pemerintahan, dan berbagai penataan lainnya.

Langkah-langkah ini kemudian mengantarkan Yahya K. Nasib untuk ditunjuk lagi sebagai penjabat bupati pada tanggal 6 Mei 2005. Sayangnya, di tengah masa jabatannya ini terjadi hal yang tidak menyenangkan, sehingga masyarakat menuntut dirinya untuk mundur. Atas desakan masyarakat, pemerintah provinsi pun mencopot Yahya K. Nasib pada bulan Januari 2005, menggantinya dengan H. Abu Bakar Mopangga, SH.

Abu Bakar Mopangga, SH menjadi Penjabat Bupati Pohuwato kedua sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55-64 Tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005, yang kemudian diperpanjang sampai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55-776a Tahun 2005 tanggal 18 Agustus 2005.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2003-2005

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Pohuwato mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu

menjadi perekat seluruh komponen pemerintah kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan sanggup menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah.

Berdasarkan hal itu, Kabupaten Pohuwato menyusun visi. Adapun visi tersebut ialah “Mewujudkan Kabupaten Pohuwato Yang Definitif, Produktif, Tangguh, dan Damai Yang Dilandasi Oleh Iman dan Takwa”. Dalam hal ini, pemerintahan yang **Definitif** berarti terbentuknya pemerintahan eksekutif dan legislatif hasil pilihan rakyat. **Produktif** berarti masyarakat Pohuwato mampu mengelola sumberdaya alam yang ada untuk peningkatan derajat kehidupannya. **Tangguh** artinya masyarakat mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kemampuan diri mereka untuk mencapai keajahteraan. Sedangkan **Damai** berarti walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama namun tetap dapat melangsungkan kehidupan yang damai berlandaskan Iman dan Takwa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Kabupaten Pohuwato menitikberatkan pembangunan pada:

1. Membangun perekonomian berbasis agrobisnis, agroindustri, pertambangan, dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju ekonomi tangguh.
2. Membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan pendidikan, kesehatan, nilai-nilai budaya, agama dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan menumbuhkembangkan partisipasi dan produktivitas serta meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera.

4. Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan serta terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang definitif.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, agama, dan nilai-nilai budaya
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
8. Berjalannya sistem pemerintahan daerah dan terbentuknya pemerintahan daerah yang definitif.

Kinerja Pemerintahan 2003 - 2004

1. Wilayah Administrasi dan Kependudukan

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi dan kependudukan Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Jumlah Penduduk	105.593	106.865
Jumlah Kecamatan	7	7
Jumlah Desa/Kelurahan	69 Desa, 3 Kelurahan, dan 1 UPT	69 Desa, 3 Kelurahan, dan 1 UPT
Jumlah SKPD	20	20
Jumlah Pegawai		

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato pada awal terbentuk sebagai kabupaten baru berjumlah 105.593 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, 69 desa dan 3 kelurahan. Jumlah tersebut pada tahun 2004

belum mengalami perubahan yang signifikan, dimana jumlah penduduk tercatat 106.865 jiwa.

2. Perkembangan APBD dan PAD

Tabel 4.2 Perkembangan APBD dan PAD Kabupaten Pohuwato

U R A I A N	TAHUN 2003	2004 (RP)
Pendapatan		95.009.502.478
Pendapatan Asli Daerah		3.350.893.960
Pajak Daerah		-
Retribusi Daerah	Masih gabung dengan Boalemo (APBD)	2.838.946.043
Lain-lain Pendapatan		511.893.917
Dana Perimbangan		77.448.281.718
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		5.871.339.718
Dana Alokasi Umum		67.576.992.000
Dana Alokasi Khusus		3.999.950.000
Lain-lain Pendapatan yang Sah		14.210.380.800
Bantuan dan Kontijensi Penyeimbang dari Pemerintah		
a. Pemerintah Provinsi		-
b. Pemerintah Pusat		5.733.862.094
Dana Perbaikan Kesejahteraan PNSD		-
Dana Luncuran 2003		989.534.686
Lain-lain Penerimaan yang Sah		7.486.984.020
<i>Special Treatment</i>		-

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

Sebagai kabupaten baru, kabupaten pohuwato masih mengandalkan APBD dari kabupaten induk, untuk pengelolaan dan operasional pemerintahan menggunakan APBD mini. Tahun 2004 APBD kabupaten Puhuwato ± 95 Milyar Rupiah, dengan pendapatan asli daerah ± 3 Milyar Rupiah.

3. Kinerja Ekonomi Makro

Tabel 4.3 Kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Pertumbuhan Ekonomi (%)		6,93 %	6,95
PDRB AHB (milyar)		3.395	3.432
PDRB AHK (milyar)		4.137	4.231
Income Per Kapita AHK (Rp)		3.796.913	3.882.992
Income Per Kapita AHB (Rp)			

Sumber : Lakip Pohuwato Tahun 2004 dan RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2005-2010

Pertumbuhan ekonomi sektoral di kabupaten Pohuwato pada tahun 2003-2004 masih sangat kecil, kondisi tersebut dapat dimaklumi karena tahun-tahun awal terbentuknya kabupaten Pohuwato arah kebijakan pembangunan masih penataan sistem pemerintahan.

4. Indikator Sektoral Kontributor Dominan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.4 Indikator sektoral Kontributor Dominan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Produksi Jagung (Ton)	Td	100.629	165.555.
Produksi Padi (Ton)	Td	18.329,67	21.462,08
Produksi Kelapa (Ton)	Td	18.221	18.759
Produksi Kakao (Ton)	Td	1.227	1,232
Perikanan Tangkap (Ton)	Td	Td	6.853
Perikanan Budidaya (Ton)	Td	Td	2.496
Populasi Sapi (Ekor)	Td	Td	20.473
Populasi Kambing (Ekor)	Td	Td	16.998
Jumlah IKM	Td	Td	Td
Jumlah UKM	Td	Td	Td

Sumber: Lakip 2004 dan RPJMD 2005-2010

Perkembangan

5. Kinerja Sosial Budaya Kemiskinan dan Pengangguran

Tabel 4.5 Kinerja Sosial Budaya, Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Jumlah Penduduk (Jiwa)		105.593	106.865
Angka Kemiskinan		62,34% (15.972 KK)	63,23% (16.220 KK)
Angka Pengangguran		8,6% dari AK (3.666 orang)	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2005-2010

6. Pendidikan

Tabel 4.6 Kinerja Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD/ sederajat			95,07
SMP/ sederajat			56,86
SMA/ sederajat			25,29
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD/ Sederajat			85,22
SMP/ Sederajat			36,62
SMA/ Sederajat			15,45

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

7. Kesehatan

Tabel 4.7 Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Angka Kematian Bayi (AKB)	TD	TD	22
Angka Kematian Ibu (AKI)	TD	TD	9
Jumlah Gizi Kurang	TD	TD	2421
Jumlah Gizi Buruk	TD	TD	126
Angka Harapan Hidup	TD	TD	65

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

8. Kinerja Infrastruktur Prasarana Pendidikan

Tabel 4.8 Kinerja Infrastruktur Prasarana Pendidikan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
TK/PAUD			37
Bangunan SD/MI		113	113
Bangunan SLTP/MTS		27	27
Bangunan SMA/MA		8	8
Bangunan SMK		1	1

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

9. Prasarana Kesehatan

Tabel 4.9 Kinerja Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Rumah Sakit Daerah	0	0	0
Puskesmas/Rawat Inap		6	7
Pustu			29
Pusling			9
Posyandu			158
Toko Obat		4	4
Apotek		0	0

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

10. Prasarana Jalan Kabupaten

Tabel 4.10 Kinerja Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Panjang Kabupaten (KM)		284,5	
Aspal (KM)		107,6	
Lapen (KM)		36,7	
Kerikil (KM)		80	
Beton (KM)		-	
Tanah (KM)		60	

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

11. Kondisi Irigasi, Air Bersih, dan Listrik

Tabel 4.11 Kondisi Irigasi, Air Bersih, dan Listrik di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Irigasi Teknis (Kecamatan)	1	1	1
Air Bersih		4,6%	4,6%
Listrik		29,5%	30,5%

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

12. Perumahan

Tabel 4.12 Kondisi Perumahan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Rumah Layak Huni Kabupaten Pohuwato	0	0	0
Rumah Layak Huni Provinsi Gorontalo	0	0	0
Pemerintah Pusat	0	0	0

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

13. Prasarana Pemerintahan

Tabel 4.13 Kondisi Prasarana Pemerintahan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten		3	3
Gedung Kantor Kecamatan		7	7

Sumber: Lakip Pohuwato Tahun 2004

Masa Kepemimpinan Zainuddin Hasan, MBA dan Ir. Yusuf Giasi

Masa kepemimpinan Zainuddin Hasan merupakan penanda dari dilakukannya Pilkada langsung untuk pertama kali di Pohuwato. Dalam hal ini antusiasme masyarakat mengikuti proses pemilihan bupati cukup tinggi dilihat dari partisipasi sekitar 64,94 persen penduduk yang mengikuti proses tersebut, mengingat bahwa hanya sekitar 70 persen penduduk yang memiliki hak pilih. Proses demokratis yang berlangsung lancar dan damai ini patut disyukuri karena menandakan kedewasaan masyarakat dan itikad baik untuk berpartisipasi membentuk lingkungan yang sejahtera dan maju.

Berbeda dengan masa bupati sebelumnya yang harus berkuat dalam persoalan pembentukan pemerintahan yang definitif, visi pembangunan

Bupati Zainuddin Hasan diarahkan untuk membentuk masyarakat Pohuwato yang produktif, tangguh, dan sejahtera yang dilandasi oleh iman dan takwa. **Produktif** mencerminkan keinginan atau cita-cita luhur agar masyarakat Pohuwato lebih produktif dalam segala bidang, termasuk pemanfaatan tenaga kerja dalam meningkatkan produktifitas. **Tangguh** dalam artian dapat mempertahankan diri dalam kondisi bagaimanapun dalam penerapan otonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Sejahtera** dalam artian tercapai kebutuhan jasmani dan rohani, dapat melaksanakan kewajiban sebagai makhluk sosial, baik di bidang pendidikan maupun keagamaan. **Landasan Iman dan Takwa** yaitu segala kebijakan yang akan diambil senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai agama.

Visi inilah yang kemudian melandasi dibuatnya garis-garis besar misi pemerintahan. Dengan adanya misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato, mengetahui peran yang dijalankan, program-program yang dijalankan, dan hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun misi pemerintah tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengamalan ajaran agama dan budaya dalam segala aspek kehidupan
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik
4. Meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan daerah

Misi ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi aparat pemerintah, tenaga kerja, dan masyarakat umum. Pendidikan yang maju, yang dibarengi dengan pengamalan ajaran agama

secara baik, akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai jenjang pendidikan, pengamalan ajaran agama, pembinaan dan pelestarian budaya dan adat istiadat. Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan beragama serta memahami budaya dan adat istiadat daerah yang ditunjang sarana dan prasarana memadai.

Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi diarahkan untuk menciptakan kondisi daerah agar kondusif bagi tumbuhnya potensi ekonomi unggulan. Upaya ini akan dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar akses komoditas unggulan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, penguatan sistem pemasaran dan kelembagaan ekonomi. Dampak yang diharapkan adalah produk unggulan dapat memiliki daya saing di pasar global, sedangkan pendekatan yang akan diterapkan ialah pendekatan ekonomi kerakyatan dengan tujuan mempercepat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya petani dalam arti luas agar dapat meningkatkan produksi yang memiliki daya saing global. Tujuan akhir dari hal ini ialah terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal yang ditunjang oleh sumber daya manusia petani andal yang dapat menghasilkan produksi berkualitas dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Pembentukan pemerintahan yang baik dilakukan agar pengelolaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien melalui penataan sistem dan kelembagaan pemerintahan daerah sekaligus menjadikannya sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan *entrepreneurial government*, penanaman nilai-nilai moralitas yang sesuai dengan norma agama dan adat istiadat setempat. Ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam menjadi fasilitator pembangunan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan sasaran terwujudnya

pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini pemerintah harus memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan beserta hasil-hasilnya sekaligus merupakan pra-kondisi bagi keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi yang lebih efisien dan produktif. Masyarakat harus didorong untuk ikut serta dalam memacu pembangunan daerah sehingga terjadi percepatan pembangunan.

Namun, semua program tidak akan berhasil seandainya tidak mengacu pada konteks perkembangan masyarakat. Program pembangunan dan pemerintahan haruslah mengacu pada nilai budaya dan moral yang tumbuh berkembang di wilayah di mana program tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, program pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato senantiasa disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di Kabupaten Pohuwato yang berupa:

- a. Nilai kemandirian, yang berbasis pada nilai kerja keras yang berbasis pada makna "*Batanga Pomaya*", yaitu pengabdian dalam pembangunan.
- b. Nilai kemitraan dan kebersamaan yang berbasis pada makna "*Mohutato Mototolianga*", rasa persaudaraan yang sangat kental dan besar.
- c. Nilai keterbukaan/akuntabilitas dapat ditemukan dalam falsafah "*Batanga Pomaya*".
- d. Nilai kesadaran kosmologis, berbasis pada falsafah "*Nyawa Podungala dan Alata Potombulu*", yakni kerelaan mengorbankan harta dan nyawa guna pembangunan daerah.

- e. Nilai kebhinekaan yakni menghargai keberagaman untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan, basis falsafah ini dapat ditarik dari makna "*Mapalus dan Huyula*".

Untuk lebih jauh menjabarkan visi dan misi tersebut di atas, pemerintah kemudian menjabarkannya dalam serangkaian program yang meliputi:

1. Program peberdayaan ekonomi kerakyatan
2. Program peningkatan sumber daya manusia
3. Program kehidupan keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat
4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
5. Program pengembangan kelembagaan pemerintah dan masyarakat

Era Zainudin Hasan – Yusuf Giasi

Selama masa lima tahun masa pemerintahan Bupati Zainuddin Hasan (2005-2010), telah banyak implementasi program yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan yang dipimpin Bupati. Untuk melihat implementasi tersebut, dapat dilihat pada data-data statistik berikut ini.

a. Administrasi dan Kependudukan

Selama rentang waktu 2005-2010 terjadi peningkatan jumlah penduduk menjadi 133.619 jiwa yang berarti selama lima tahun mengalami peningkatan sebanyak 25.075 jiwa atau rata-rata 5.000 jiwa per tahun. Sementara itu, wilayah administratif yang tadinya hanya berjumlah 7 kecamatan menjadi 13 kecamatan di tahun 2010 dengan jumlah

desa/kelurahan yang meningkat menjadi 100. Berikut data statistik mengenai hal itu:

Tabel 4.14 Kondisi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2005	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010
Jumlah Penduduk	108.544	114.560	115.760	123.726	128.049	133.619
Jumlah Kecamatan	7	7	7	13	13	13

URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
--------	------	------	------	------	------	------

Jumlah Desa/Kelurahan	69 Desa 3 Kelurahan	69 Desa 3 Kelurahan	69 Desa 3 Kelurahan	100 Desa, 3 Kelurahan	100 Desa	100 Desa, 3 Kelurahan
Jumlah SKPD						
Jumlah Pegawai					3.777	4.006

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati 2005-2010

b. Perkembangan APBD dan PAD

APBD dan PAD merupakan indikator yang dapat menunjukkan fakta-fakta ekonomi tentang suatu daerah. Secara umum, Pendapatan Daerah Puhowato selama 2005-2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (dari 129.652.154.860 menjadi 382.334.433.132) atau hampir mencapai setengah lebih. Sementara Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan bahkan hingga tiga kali lipat (dari 4.585.582.276 menjadi 13.668.934.500.00)

Pendapatan Daerah (Rp)	129.652.154.860	221.876.616.521	290.353.852.822	357.215.518.912	358.098.106.941	382,334,433,123.
PAD (RP)	4.585.582.276	9.119.406.515	9.579.944.869	12.060.034.970	15.146.117.750	13,668,934,500.00
Dana Perimbangan	123.121.112.584	212.757.210.006	257.868.277.521	335.155.483.942	342.951.989.191	323,672,749,323.00
Pendapatan Lain	1.945.460.000	0	22.905.630.431	10.000.000.000	0	44,992,749,300.00

c. Kinerja Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi makro Kabupaten Pohuwato sepanjang tahun 2005-2010 cukup menggembirakan. Meski tidak begitu besar, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini secara umum terus mengalami peningkatan secara konstan. Sementara PDRB per kapita juga mengalami peningkatan.

Tabel 4.15 Perkembangan APBD dan PAD di Kabupaten Pohuwato

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati 2005 - 2010

Tabel 4.16 Perkembangan Ekonomi Makro di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pertumbuhan Ekonomi	7,24	7,25	7,31	7,41	7,14	7,45
PDRB ADHB (Milyar)	492,49	585,374	712,378	888,547	1.036	1.206
PDRB ADHK (Milyar)	366,094	392,636	421,343	452,561	484,95	521,09
PDRB Per Kapita ADHB (Juta)	4,541	5,298	6,330	7,755	8,283	9,367
PDRB Per Kapita ADHK (Juta)	3,376	3,553	3,744	3,950	3,876	4,047

Sumber : LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati 2005-2010

Ket.: ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi sektor pertanian, peternakan, dan agrobisnis. Secara umum jagung, yang merupakan komoditas andalan Pohuwato, merupakan yang tertinggi di seluruh Provinsi Gorontalo. Dalam hal produksi jagung ini terjadi peningkatan produksi dari semula 243.397 ton di tahun 2005 menjadi 338.661 ton pada tahun 2010. Sementara produksi padi meningkat dari 21.417 ton pada tahun 2005 meningkat menjadi 32.709 ton pada tahun 2010. Sayangnya, produksi kakao tampak mengalami fluktuasi yang cukup tajam dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2010.

Tabel 4.17 Perkembangan Sektor Pertanian, Peternakan, dan Agrobisnis di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2005	TAHUN 2006	Tahun 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	Tahun 2010
Produksi Jagung (Ton)	243.397	243.076	371.340	368.535	310.579	338.661
Produksi Padi (Ton)	21.417	20.552	26.560	34.561	31.347	32,709
Produksi Kelapa (Ton)		18.221	21,792	18.061	7.757	18.560
Produksi Kakao (Ton)		1,227	2.566	3.470	3.478	884
Perikanan Tangkap (Ton)	7.506	8.032	9.469	9.617	11.876	11,771

Perikanan Budidaya (ton)	694	723	4,275	4.348	5.553	12.845
Populasi Sapi (ekor)	41.312	42.531	45.443	57.452	60.461	63.786
Populasi Kambing (ekor)	18.054	17.346	19.859	20.721	21.726	23.289
Perusahaan Besar	7	9	21	21	30	4
Jumlah IKM	1.000	1.438	1.438	1.438	2.115	2.202
Jumlah UKM	1.018	1.198	1.740	1.740	2.064	2.211

Sumber: BPS Pohuwato tahun 2007-2010

Kemiskinan dan Pengangguran

Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Pohuwato terus menurun pada setiap tahun. Angka kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2006 yang mencapai 32,06 persen sementara pada tahun 2010 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 18,75 persen.

Keberhasilan program ekonomi tercermin di antaranya dalam proporsi angka pengangguran dari seluruh angkatan kerja. Dalam hal ini pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran yang pada tahun 2005 mencapai 3,0 persen menjadi hanya 2,6 persen.

Tabel 4.18 Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2005	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010
Jumlah Penduduk (Jiwa)	108.544	114.560	115.760	123.726	128.049	133.619
Angka Kemiskinan (persen)	31,88	32,06	29,74	23,28	21,15	18,75
Angka Pengangguran (% dari angkatan kerja)	3,0			3,42	2,84	2,6

Sumber: BPS Pohuwato Tahun 2005-2010

Pendidikan

Pendidikan diyakini sebagai cara utama untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan kapasitas, sumber daya manusia. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya yang baik pula. Itu sebabnya, penyelenggaraan pendidikan merupakan hal penting dalam pemerintahan. Selama tahun 2005-2009 angka partisipasi kasar pendidikan di semua tingkatan secara umum mengalami peningkatan (yang tertinggi pada tingkat SMA yang meningkat dari 29,77 persen menjadi 71,64 persen).

Tabel 4.19 APK dan APM Pendidikan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2005	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
SD/Sederajat	88,15				110,03	
SMP/Sederajat	75,48				108,16	
SMA/Sederajat	29,77				71,64	
Angka Partisipasi Murni (APM)						
SD/Sederajat	77,06				94,32	
SMP/Sederajat	43,25				82,42	
SMA/Sederajat	17,98				49,76	

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati 2005-2010

Kesehatan

Dalam hal kesehatan, terjadi perkembangan yang cukup menggembarakan. Angka kematian bayi turun cukup signifikan yang dibarengi dengan turunnya angka kematian ibu serta gizi buruk. Meningkatnya pendidikan dan kesehatan menunjukkan tersedianya sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.

Tabel 4.20 Perkembangan Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	TAHUN 2005	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010
Angka Kematian Bayi (AKB)	26				9	
Angka Kematian Ibu (AKI)	12				8	
Jumlah Gizi Kurang	2.213				100	
Jumlah Gizi Buruk	238				60	
Angka Harapan Hidup	68				69	

Sumber: BPS Pohuwato

Kinerja Infrastruktur

Dalam pembangunan infrastruktur, secara umum mengalami peningkatan. Semua hal yang berkaitan dengan itu sangat menggembarakan.

Infrastruktur pendidikan di semua tingkatan mengalami peningkatan yang menggembarakan. Di tingkat pendidikan pra sekolah, peningkatan terjadi hampir dua kali (dari 46 di tahun 2005 menjadi 89 di tahun 2010). Di tingkat pendidikan dasar peningkatan memang tidak setinggi pendidikan pra sekolah namun cukup menggembarakan. Peningkatan yang paling signifikan barangkali terjadi pada tingkat SMP/MTS yang mencapai angka tertinggi (dari 27 di tahun 2005 menjadi 47 di tahun 2010).

Tabel 4.21 Prasarana Pendidikan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
TK/PAUD	46	51	64	74	81	89
Bangunan SD/MI	103	105	112	119	117	122
Bangunan SLTP/MTs	27	31	42	44	45	47
Bangunan SMA/MA	10	10	10	11	11	11
Bangunan SMK	1	1	1	2	8	10

Sumber: BPS Pohuwato Tahun 2007-2010

Prasarana kesehatan juga mengalami peningkatan. Jumlah puskesmas yang melayani rawat inap meningkat menjadi 16 dari hanya 7 di tahun 2010. Sementara jumlah Posyandu meningkat dari 73 menjadi 176. Hanya saja terjadi penurunan dalam jumlah apotek dan polindes.

Tabel 4.22 Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Rumah Sakit Daerah	0	1	1	1	1	1
Puskesmas/Rawat Inap	7	9	9	10	16	16
PUSTU	25	25	24	24	27	28
PUSLING	7	7	9	10	7	11
Posyandu	73	158	176	188	186	176
Toko Obat	5	5	2	6	6	2
Polindes	36	34	34	10	22	29
Apotek	0	1	2	7	7	4

Sumber: BPS Pohuwato Tahun 2007-2010

Kondisi jalan juga mengalami peningkatan. Total jalan yang diaspal pada tahun 2010 meningkat menjadi 241,1 kilometer (dari 13,5 kilometer di tahun 2007).

Tabel 4.23 Prasarana Jalan Kabupaten di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Panjang Jalan Kabuptaen (Km)			180,2	180,2	582,9	583,2
Aspal (Km)			13,5	15,3	241,3	241,1
Lapen (Km)			-	-	6,21	7,5
Kerikil (Km)			91,6	91,6	131,2	129,2
Beton (Km)			-	-	8,9	8,9
Tanah (Km)			73,3	73,3	195,3	196,5

Sumber: BPS Pohuwato Tahun 2007-2010

Begitu pula untuk sarana penyaluran air bersih yang telah mengalami peningkatan dari 1.959 di tahun 2006 menjadi 4675 di tahun 2010. Sedangkan untuk listrik meningkat menjadi 12.199 di tahun 2010.

Tabel 4.24 Kondisi Irigasi, Air Bersih, dan Listrik Pendidikan di Kabupaten Pohuwato

URAIAN	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Irigasi Teknis (Kecamatan)	1	1	1	1	1	1
Air Bersih (RT)		1.959	2.629	3.635	3.852	4.675
Listrik (RT)			10.879	10.879	11.589	12.199

Sumber: BPS Pohuwato Tahun 2007-2010